



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## BANJARMASIN POST



Senin

3 Februari 2025

# Pemerintah Harus Bijak

**PENGHEMATAN** anggaran belanja bisa menjadi langkah positif, bila dilakukan secara tepat sasaran dan diterapkan dengan baik.

Namun, perlu diingat dan diantisipasi potensi dampak negatifnya, terutama pada sektor swasta.

Efisiensi anggaran perjalanan dinas memang diperlukan, agar alokasi belanja benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah maupun pemerintah pusat.

Tetapi, di daerah yang sektor swastanya masih bergantung pada kegiatan pemerintah, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak ganda.

Misalnya hotel dan rumah makan di daerah, yang pendapatannya bergantung pada kegiatan pemerintah. Mereka pasti akan terkena imbas.

Selain potensi penurunan pendapatan, hal ini juga dapat berimplikasi pada tenaga kerja, seperti berkurangnya take-home pay. Bila situasinya memburuk, dampaknya bisa terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja.

Karena itu penting adanya upaya mitigasi, agar dampak negatif tersebut bisa diminimalisasi.

Diketahui bersama, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat ini menjadi perhatian.

Program tersebut saat ini rasanya kurang tepat dijalankan, di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

Bukan program itu tidak baik, tetapi kemampuan kita secara finansial masih terbatas.

Program MBG lahir dari politik, bukan hasil dari yang matang. Ratusan anggaran seharusnya digunakan secara efisien meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia kita.

Ke depan pemerintah lebih fokus pada pembangunan sektor pendidikan seperti menyediakan pendidikan gratis dari dasar hingga perguruan tinggi, pemerataan fasilitas pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan sen.

Kini utang negara besar, sehingga kita cermat dalam mengalokasi belanja.

Di tengah beban negara yang semakin pemerintah harus bijak dalam menentukan program.

Efisiensi anggaran diterapkan dengan tepat akan memberikan

at besar, sementara kebijakan yang terarah justru bisa menimbulkan masalah baru.

Dalam situasi seperti ini, kita harus pintar mengelola sumber daya yang terkumpul pada sektor yang mendukung pembangunan jangka panjang, seperti pendidikan adalah langkah yang lebih bijak. (m



**HIDAYATULLAH  
MUTTAQIN**

Pengamat Ekonomi Universitas  
Lambung Mangkurat



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN



Universitas Lambung Mangkurat



KOLABORASI: ULM dan PT Freeport Indonesia bekerja sama Restorasi Mangrove.

### ULM-Freeport Restorasi Mangrove 611 Hektare

**BANJARMASIN** - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggandeng PT Freeport Indonesia melakukan terobosan strategis pelestarian ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung Jumat (28/2).

Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menjelaskan kerja sama ini bertujuan mengembangkan kawasan mangrove seluas 611 hektare di Kabupaten Kotabaru. "Kami ingin menjadikan ULM pusat riset mangrove tropis terkemuka," ujarnya.

Program inovatif ini tidak sekadar restorasi lingkungan, melainkan juga membuka peluang akademis bagi mahasiswa. Mereka akan dilibatkan dalam kegiatan praktis mulai dari pengembangan lahan, budidaya kepiting, hingga ekowisata berbasis masyarakat.

Erik Teguh Primiantoro dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan pentingnya kerja sama berbasis sains. "Ini bukan sekadar charity, melainkan investasi jangka panjang dengan pendekatan People, Planet, Prosperity," ujarnya.

Kerja sama ULM-Freeport diharapkan menjadi model pengelolaan lahan basah berkelanjutan dan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. (\*/dyl/al/ram)



**SAMBUKAN:** Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri saat koglitan MoU bersama PT Freeport Indonesia.



Universitas  
LAMBUNG MANGKURAT  
Waja Sampai ka Puting

**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**



Senin

3 Februari 2025

## Hari Ini Dosen ASN Aksi di Kampus ULM

### ● Tuntut Pencairan Tunjangan Kinerja

**BANJARMASIN, BPOST** - Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Sainstek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Kerwil Kalimantan Selatan akan menggelar aksi solidaritas pada Senin (3/2).

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional ADAKSI Tukin for All.

yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi seluruh dosen ASN di bawah Kemendikbudristek.

Aksi akan berlangsung di General Building Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kampus Banjarmasin mulai pukul 09.30 Wita.

Para peserta akan menyampaikan

pernyataan sikap dan mendukung tuntutan ADAKSI secara nasional.

Dengan tagar #TukinForAll, #BayarTukinDosenKemendikbudristek, dan #DosenBukanSapiPerah, aksi ini bertujuan menyoroti pentingnya kese-

● Hal 11 kol 1-3



DOK. BANJARMASIN POST

**GERBANG KAMPUS** - Gerbang utama kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Jalan Brigjend Hasan Bawry, Banjarmasin. Dosen ASN bakal menggelar aksi menuntut tukin di kampus ULM, Senin (3/2).

### Hari Ini...

● Sambutan Hal 9

jahteraan dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

"Hidup dosen Indonesia!" menjadi seruan yang akan kembali menggema dalam aksi ini, seiring dengan perjuangan jutaan tenaga pendidik di seluruh negeri.

Koordinator ADAKSI

ULM, Juliyatin Putri Utami membenarkan rencana tersebut. Namun, ia masih belum memberikan banyak komentar karena sedang mempersiapkan kegiatan aksi. (mar)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## BARITO POST



## Baksos Alumni Lintas Angkatan FH ULM, Buruh Angkut Terharu Dapat Sembako

Banjarmasin, BARITO

Komunitas Arisan Alumni Lintas Angkatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM) kembali menggelar bakti sosial (baksos) dengan membagikan ratusan paket sembako untuk warga yang kurang mampu.

Koordinator Kegiatan Baksos, Jamilah, SH mengatakan baksos digelar, Sabtu (1/3) bertepatan dengan 1 Ramadhan 1446 Hijriyah di lokasi kegiatan dipusatkan di Pos Polisi Sudinampir.

"Kegiatan baksos memang sengaja dilaksanakan dengan mengambil momentum bulan Ramadhan, maksudnya agar manfaat dari kegiatan baksos ini bisa meringankan saudara-saudara kita yang kurang mampu dan sehari-hari berada atau mencari nafkah di seputaran Pos Polisi Sudinampir," jelas Jamilah.

Untuk baksos tahun 2025 ini kami mengangkat tema "Dengan Berbagi Kita



**PAKET SEMBAKO**-Suasana pembagian paket sembako di Pos Polisi Sudinampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Sabtu (1/3) (foto : iai)

Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sersama, tambah alumni FH ULM Angkatan tahun 1983 ini.

lanjutnya untuk bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, teh dan garam. "Ada 275 paket yang kami bagikan. Sedangkan paket kami kumpulkan dari partisipasi alumni khususnya Komunitas Arisan Alumni Lintas Angkatan FH ULM," jelas Jamilah.

Sedangkan sasaran

penerima adalah buruh (kuli) angkut, tukang parkir, pedagang asongan, tukang ojek dan tukang becak. "Kami berupaya memberikan kupon pengambilan sembako secara selektif, sehingga para penerima benar-benar orang yang memang membutuhkan bantuan dan tepat sasaran," tambah Jamilah.

Amang Iyus, salah seorang penerima bantuan paket sembako, yang sehari-hari mencari nafkah dengan menjadi buruh angkut di Pasar Lima mengatakan terharu

sekali-sangat bersyukur mendapatkan bantuan paket sembako dari Komunitas Arisan Alumni Lintas Angkatan FH ULM.

"Alhamdulillah, bantuan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi saya yang punya tanggungan istri dan tiga orang anak ditambah lagi masih ada orang tua yang ikut bersama saya," ujar Amang Iyus dengan wajah terlihat gembira.

Amang Iyus mengaku setiap hari bekerja sebagai buruh angkut dengan penghasilan yang bisa didapatkan sehari-hari berkisar antara Rp30.000 sampai Rp50.000.

"Penghasilan seperti ini tentu saja sangat kurang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi harus disyukuri dan kalau kita selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmat untuk hambanya, seperti hari ini kami mendapatkan bantuan sembako dari buahan 'pian-pian,'" ujar Amang Iyus. **rel/sop**

## Alumni FH ULM Isi Ramadhan dengan Bakti Sosial

Banjarmasin, BARITO

Komunitas Alumni Lintas Angkatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM) d/h Unlana Banjarmasin kembali menggelar bakti sosial atau baksos menyumbang Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Koordinator Baksos Jamilah ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Ahad, mengatakan bahwa kegiatan yang mereka gelar guna meringankan beban warga masyarakat kurang mampu dalam menghadapi Bulan Ramadhan 1446 H seperti guru, pekerja/buruh angkut dan lainnya.

"Kami sengaja melaksanakan baksos dengan mengambil momentum Bulan Ramadhan agar manfaatnya bisa meringankan saudara-saudara kita yang kurang mampu sehari-hari berada atau mencari nafkah mereka dan keluarga," ujar Jamilah.

Alumnus FH Unlana 1983 itu menerangkan, pada baksos

Tahun 2025 mengangkat tema kegiatan ini "Dengan Berbagi Kita Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sersama" membagi 275 paket sembako terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, teh dan garam.

Sedangkan sasaran penerima baksos antara lain buruh (kuli) angkut, tukang parkir, pedagang asongan, tukang ojek dan tukang becak yang berada sekitar Pos Polisi Sudinampir.

Pasar Sudinampir Banjarmasin dengan sistem kupon.

"Kami berupaya memberikan kupon pengambilan sembako secara selektif, sehingga para penerima benar-benar orang yang memang membutuhkan bantuan dan tepat sasaran," tambah Jamilah.

Amang Iyus, salah seorang penerima bantuan paket sembako, yang sehari-hari mencari nafkah dengan menjadi buruh angkut di Pasar Lima Banjarmasin me-

ngatakan terharu sekaligus sangat bersyukur mendapatkan bantuan paket sembako dari Komunitas Arisan Alumni Lintas Angkatan FH ULM.

"Alhamdulillah, bantuan tersebut tentu saja sangat bermanfaat bagi saya yang punya tanggungan istri dan tiga orang anak ditambah lagi masih ada orang tua yang ikut bersama saya," ujar Amang Iyus dengan wajah terlihat gembira.

Amang Iyus mengaku, setiap hari bekerja sebagai buruh angkut dengan penghasilan sehari-hari berkisar antara Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. "Penghasilan seperti ini tentu saja sangat kurang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi harus disyukuri. Dan kalau kita selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmat untuk hambanya, seperti hari ini kami mendapatkan bantuan sembako dari buahan 'pian-pian,'" ujar Amang Iyus.

**Ant/Idn**



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Senin  
3 Maret 2025





## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Senin  
3 Maret 2025

## Sistem Klaster dan Benahi dari Hulu

**UPAYA** Pemkab Banjar mengembalikan sistem TPA Cahaya Kencana ke sistem sanitary landfill sudah langkah yang benar.

Teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ini dijadikan pelecut untuk perbaikan. Mengatasi sampah di lingkungan tidak gampang dan murah. Perlu pembiasaan warga dan ekosistem sampah yang baik tentu ditunjang dengan fasilitas.

Jangan sampai yang keliru dibiarkan. Sehingga dampak dari pengelolaan sampah yang belum optimal akan meningkatkan biaya operasional dan penanganan sampah. Malah jika dibiarkan, akan sama seperti di Banjarmasin dan akan lebih berat lagi penanganan dan perlu pembiayaan lebih banyak lagi.

Karena itu, hemat kami dengan pengelolaan sampah dari sumbernya akan memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan hingga menekan biaya pengelolaan sampah.

Jika melihat geografis di Kabupaten Banjar, sistem pengumpulan sampah bisa dilakukan di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Banjar yang padat penduduk, seperti wilayah Martapura, Gambut, Kertakharayur, Sungaitabuk dan lainnya dengan sistem klaster Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tujuannya untuk mengurangi jarak pengangkutan sampah ke TPA Cahaya Kencana atau fasilitas pengolahan.

**NEWS  
ANALYSIS**



**DR ENG AKBAR  
RAHMAN MT**

Pengamat Kebijakan Kota ULM

Selanjutnya, pihak terkait musti merancang rute pengangkutan sampah yang paling efisien, sehingga dapat memperpendek jalur pengangkutan dan dapat mengurangi biaya operasional dan emisi gas buang.

Agar proses pengangkutan lebih efektif, pemerintah dapat menggunakan kendaraan yang sesuai dengan jenis dan volume sampah.

Misalnya, menggunakan truk kompresi untuk sampah rumah tangga dan truk terbuka untuk sampah besar atau konstruksi.

Proses pengangkutan dapat menyesuaikan frekuensi pengangkutan berdasarkan volume dan jenis sampah di tiap area seperti di pusat perkotaan padat penduduk seperti Martapura dan Sungaitabuk yang lebih sedikit penduduknya.

Wilayah dengan volume sampah tinggi diperlukan pengangkutan lebih sering dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Penjadwalan pembuangan sampah diperlukan dan disampaikan ke masyarakat agar dapat mengurangi tumpukan sampah di masa-masa proses pengangkutan tidak ada jadwalnya. Jadwal ini perlu disosialisasikan dan disampaikan kepada seluruh masyarakat.

Hal yang paling penting dalam pengelolaan sampah adalah mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya mengurangi sampah dari sumbernya, misal giat pemilahan sampah dan pemanfaatan ulang serta pengolahan sampah di sumbernya yakni pembuatan komposter dan lainnya.

Lagi-lagi ditegaskan, upaya pengurangan sampah dari sumbernya (hulu) akan mengurangi beban pemerintah dalam pengangkutan sampah dan biaya pengelolaannya.

Strategi selanjutnya, pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mendaur ulang atau memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, sehingga mengurangi beban pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Adapun, untuk mengurangi timbunan dan timbunan sampah yang semakin hari semakin banyak, pemerintah juga bisa memilih langkah pemberian insentif kepada masyarakat atau pihak swasta yang aktif dalam pengurangan dan daur ulang sampah, serta memperhatikan pendanaan yang memadai untuk mendukung operasional dan inovasi dalam pengelolaan sampah. (Hs)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN



Selasa  
4 Februari 2025

### PENDIDIKAN

#### Dosen ASN Ancam Mogok Mengajar

**BANJARMASIN** - Semar Jaya! Sebelum masuk rekening, jangan percaya!" seru salah seorang pengunjuk rasa.

Ratusan dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiknasintek (Adaksi) Kalimantan Selatan berdemo di kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Senin (3/2).

Aksi ini melibatkan dosen dari tiga perguruan tinggi di Kalsel, yakni ULM, Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), dan Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala).

Aksi ini ungkapan kekecewaan pada pemerintah pusat lantaran belum dibayarkannya tunjangan kinerja (tukin) yang telah dijanjikan sejak tahun 2020.

Membawa poster tuntutan, para dosen berharap aksi ini dapat menggaugah perhatian pemerintah untuk segera memenuhi janji tersebut. ■

► Baca Dosen... Hal 14



JANGAN KOLER: Ratusan dosen ASN di Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa di ULM Banjarmasin, Senin (3/2).

## Sebelum Masuk Rekening Jangan Percaya

### ■ DOSEN...

Sambungan Hal 9

Teknis pemberian tukin dosen ASN Kemendiknasintek sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2020.

Selain itu, menjelang akhir masa jabatannya, Menteri Nadiem Makarim menerbitkan Keputusan Mendikbud Nomor 447/P/2024 yang menetapkan jabatan, kelas jabatan, dan besaran tunjangan kinerja untuk dosen fungsional.

Namun, tukin itu justru terancam lenyap karena pemerintah beralasan tidak mengalokasikan anggarannya di APBN 2025.

Koordinator Adaksi Kalsel, Juliyatin Putri Utami mengatakan tuntutan mereka adalah pembayaran tukin secara rapel untuk jangka waktu empat tahun.

Mereka juga meminta pemerintah memberikan kesetaraan dalam pembayaran tunjangan, tanpa membedakan antara satuan kerja

(satker), badan layanan umum (BLU), maupun perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH).

Selain itu, mereka menolak pasal selisih yang membuat pemotongan tukin dengan sertifikasi dosen (serdos). "Kami ingin tukin tersendiri dan serdos tersendiri, tegas Utami.

Salah seorang peserta aksi, Rahmida Erliyani meminta pemerintah memenuhi hak-hak dosen ASN Kemendiknasintek.

"Yang kamiuntut di sini adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan membayarkan hak kami, seluruh dosen, dari tahun 2020 hingga 2024," tekan Rahmida.

Menurutnya, jika dibiarkan, maka kondisi ini mencerminkan diskriminasi terhadap dosen ASN Kemendiknasintek.

Sebab, dosen dan guru dari kementerian lain telah menerima hak-hak mereka sejak lama.

"Kemarin, bahkan ada rencana dari Adaksi untuk mogok mengajar selama satu semester. Tapi itu masih sebatas wacana, kami tetap menunggu komando dari pusat," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat, Muhamad Rusmin Nuryadin menyampaikan dukungan penuh dari rektorat kepada para dosen.

"Dalam setiap rapat dengan kementerian, kami selalu menyampaikan bahwa ini adalah tuntutan yang sah dari para dosen ASN yang selama ini terzalimi dibandingkan dosen dari kementerian lain," ujar Rusmin.

Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto, Kemendiknasintek, dan DPR memberikan perhatian khusus pada persoalan ini.

"Diskriminasi seperti ini seharusnya tidak terjadi," ujarnya.

Terkait wacana mogok mengajar, Rusmin mengaku bisa memahami rasa frustrasi para dosen, tetapi ia masih berharap hal itu tidak sampai menjadi kenyataan.

"Saya kira, mogok mengajar bukanlah solusi. Mengajar adalah kewajiban kita sebagai dosen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa," tutupnya. (daf/az/fud)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN



Selasa  
4 Februari 2025



**PEDULI:**  
IWAPI Kota  
Banjarmasin  
menggelar  
Bakti Sosial  
di Desa  
Sungai Tabuk,  
Keramat,  
Kabupaten  
Banjar,  
Senin (3/2).

## IWAPI Banjarmasin Baksos di Sungai Tabuk

**BANJARMASIN** - DPC Ikatan Wanita Indonesia (IWAPI) Banjarmasin menunjukkan kepedulian kepada warga yang terdampak Banjir dengan menggelar bakti sosial (baksos) berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako kepada warga di Sungai Tabuk Keramat, Kabupaten Banjar, Senin (3/2).

Ketua DPC IWAPI Banjarmasin, Hj Aida Muslimah menjelaskan kegiatan bakti sosial ini digelar

dalam rangkaian Hari Ulang Tahun IWAPI ke-50. "Alhamdulillah, kami bisa menggelar bakti sosial di Desa Sungai Tabuk Keramat, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini juga digelar bersama DPD IWAPI Kalsel, Yayasan Suaka Ananda, FKIK ULM, dan IWAPI Kabupaten Banjar," jelasnya.

Adapun paket sembako yang dibagikan, juga ada air mineral, roti dan biskuit untuk masyarakat, serta pengobatan gratis. "Kami

berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir," harapnya.

Achmad salah satu warga berterima kasih atas kedatangan rombongan IWAPI Banjarmasin dan ini merupakan bantuan yang pertama datang ke kampung mereka. "Terima kasih kepada IWAPI semoga mereka yang membantu kami mendapat keberlimpahan rejeki" pungkasnya. (syu/gr/aza)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
4 Februari 2025

## ULM Siapkan 1.929 Kuota

WAKTU semakin menipis bagi siswa SMA, SMK, dan MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025.

Pendaftaran dimulai dengan registrasi akun sekolah pada 6-31 Januari. Siswa eligible atau memenuhi syarat dapat mendaftarkan akunya pada 13 Januari-18 Februari.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Kalimantan Selatan menyiapkan kuota 7.512 kursi untuk calon mahasiswa baru. Sebanyak 1.929 di antaranya dialokasikan untuk jalur SNBP ULM menawarkan 120 program studi (prodi) di 10 fakultas. ULM juga membuka beberapa program baru pada 2025 seperti S1 Sosiologi.

● Hal5kol1-3

## ULM Siapkan 1.929...

● Sambungan Hal 1

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ULM, Iwan Affanie, menekankan jalur SNBP sebagai kesempatan emas bagi siswa berprestasi yang ingin menghindari persaingan ketat di jalur tes tertulis. Menurutnya, jalur ini bukan hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi juga melihat konsistensi prestasi akademik siswa selama di sekolah.

"SNBP adalah jalur yang memberikan apresiasi kepada siswa-siswa berprestasi. Mereka yang lolos seleksi ini tidak perlu mengikuti ujian tulis berbasis komputer seperti jalur SNBT," ujarnya.

Tahun ini, ada beberapa perubahan penting dalam pelaksanaan SNBP yang perlu diperhatikan calon peserta. Salah satunya adalah penambahan kuota sebesar 5 persen untuk siswa eligible dari sekolah yang telah menerapkan sistem e-rapor. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas bagi siswa-siswa berprestasi dari berbagai daerah, terutama dari sekolah-sekolah yang telah terintegrasi secara digital.

Selain itu, peserta SNBP 2025 juga memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih jurusan. Jika sebelumnya hanya bisa memilih dua prodi, kini mereka dapat memilih hingga empat prodi, yang terdiri atas dua program akademik (sarjana) dan dua program vokasi (diploma tiga atau sarjana terapan).

Meski jalur SNBP mengandalkan prestasi akademik, bukan berarti proses seleksi ber-

langsung tanpa tantangan. Setiap sekolah memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan siswa yang eligible, yaitu mereka yang masuk dalam peringkat teratas di kelas berdasarkan akreditasi sekolah dan nilai rapor.

Oleh karena itu, tidak semua siswa ke-12 secara otomatis bisa mendaftar. Mereka yang terpilih harus segera membuat akun Portal SNPMB untuk melakukan registrasi sebelum pendaftaran ditutup.

Pendaftaran SNBP tahun ini dimulai pada 4-18 Februari 2025. Setelah proses pendaftaran ditutup, hasil seleksi akan diumumkan pada 18 Maret 2025.

Informasi lengkap mengenai SNBP 2025 dapat diakses melalui laman resmi SNBP di <https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id> atau website resmi ULM di <https://www.ulm.ac.id>.

Sementara ini SMAN 1 dan 2 Banjarmasin menghadapi masalah pendaftaran SNBP 2025.

Kepala SMAN 1 Banjarbaru Finno Rahmi mengatakan, untuk pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sudah selesai. Karang mempersiapkan siswa mendaftar SNBP. "Untuk pendaftaran, kami menyiapkan banner dan tim IT," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 2 Banjarbaru Fitri. "Dari awal penjurusan siswa eligible kami berkoordinasi dengan operator, guru BK, beserta wali kelas. Untuk memonitor memberikan bantuan kepada semua anak-anak kami," ujarnya. (msr/nan)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**



Selasa  
4 Februari 2025

# Siswa Terancam Gagal Daftar SNBP

## 15 MA Tak Dapat Slot Jalur Prestasi

**MARTAPURA, BPOST** - Sejumlah Madrasah Aliyah (MA) di Kalimantan Selatan mengalami kendala dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) agar lulusannya bisa kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025.

Dua di antaranya di Kabupaten Banjar yakni MAN 3 dan MAN 4. Kedua MAN berakreditasi A itu pun terancam tidak mendapatkan slot jalur prestasi.

Saat dikonfirmasi, Senin (3/2), Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum MAN 4 Banjar, Mujahir, mengatakan pihaknya masih mengupayakan agar slot yang tersedia tidak hangus.

"Ada kuota, 103 siswa kami bisa mendaftar PTN lewat jalur SNBP. Jumlah tersebut adalah 40 persen dari total siswa kelas 12 di MAN 4 Banjar," urai Mujahir.

Mujahir menyatakan pihaknya sudah menjelaskan ke siswa pada apel pagi dan meminta mereka bersabar. Hal ini karena pihak sekolah sedang melakukan berbagai cara agar kuota tersebut tetap bisa digunakan.

Dua hari yakni tanggal 1 dan 2 Februari, ketika ada masa perpanjangan,

### Siswa Terancam...

● Sambungan Hal 1

kami kirimkan kelengkapan data yang diminta. Karena itu saat ini kami menunggu panitia SNBP pusat," ujar Mujahir.

Pada 2024, Mujahir menyatakan proses pengisian PDSS berjalan lancar. Kuota SNBP sebanyak 103 tercapai semua. "Kami sempat analisis, ini karena pada 2024 masih menggunakan Kurikulum 2013. Sekarang ada kendala di sistem PDSS sebab di madrasah kami ada perubahan Kurikulum Merdeka, sehingga proses upload-nya perlu penyesuaian," ujar Mujahir.

Rumaisha dari kelas IPA berharap pihak madrasah bisa menyelesaikan persoalan yang mengancam masa depannya tersebut. "Karena ini pejuang kami bisa melanjutkan ke PTN dari jalur prestasi," harapnya.

Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemendiknas) Banjar, Dinyati, mengatakan ada banyak madrasah atau sekolah yang punya kendala sama. Namun di Banjar ada dua yakni MAN 3

dan MAN 4.

"Tengah diperjuangkan untuk tetap dapatkan kuota. Malam ini kami zoom meeting terkait PDSS dan Pangkalan Data Ujian Madrasah (PDUU). Semoga ada solusi," ujarnya.

EPost mendapat informasi ada 15 MA yang menghadapi persoalan tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Senin malam, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel M Tambrin menyatakan pihaknya langsung menggelar pertemuan secara virtual dengan para kepala MAN. Tambrin menegaskan pimpinan MAN itu akan mendapat teguran secara tertulis. "Selain itu, DiJen pusat mempertimbangkan untuk para tersebut dikembalikan menjadi guru biasa," tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Adanya kesempatan masuk PTN melalui SNBP tidak disia-siakan oleh Pilar Ardina, siswi Kelas 12 IPA 1 MAN 1 Banjarmasin. Dengan nilai matematika rata-rata 92, Pilar optimistis lulus menjadi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Prodi Pendidikan Matematika.

"Sejak semester 1 saya berkomitmen untuk menjaga nilai pelajaran matematika. Minimal bisa mempertahankan setiap ujian semester," katanya, Senin.

Dalam proses mengikuti SNBP, Pilar mengaku sangat dimudahkan oleh pihak sekolah. Mulai dari menyatukan dokumen, hingga konsultasi dalam menentukan PTN tujuan. "Sampai sekarang belum ada kendala, dan semoga urusan saya dilancarkan hingga dinyatakan lulus SNBP," harapnya.

Kepala MAN 1 Banjarmasin Naimah mengungkapkan secara keseluruhan proses SNBP di sekolahnya berjalan lancar. Dari 250 siswa kelas 12, 100 siswa berkesempatan mengikuti SNBP 2025.

Ada pun SMAN 1 Banjarmasin, sebanyak 148 siswa berkesempatan masuk PTN lewat jalur SNBP. Kuota tersebut merupakan 40 persen dari total siswa kelas 12. Mereka dipilih berdasarkan peneringkatan nilai rapor dari semester 1 hingga 5.

Satu di antaranya yakni Gytha Namira Ramadhenta. Dia mengaku sangat tertarik pada jurusan manajemen di Universitas Airlangga (Una-

ir). Gytha optimistis bisa diterima di PTN tersebut.

Hal itu karena pelajar kelas 12 J tersebut sudah belajar dengan sungguh-sungguh sejak semester 1. "Itu saya lakukan agar dapat menjadi siswa eligible, sekaligus mengumpulkan berbagai prestasi," katanya, Senin.

Hal serupa ditungkapkan Pandu Satrio Wicaksono, yang juga ingin kuliah di Unair Jurusan Sistem Informasi. Terlebih siswa kelas 12 F ini aktif di sebagai pengurus OSIS.

Agar seluruh siswa berprestasi dapat terserap maksimal di PTN, pihak sekolah melakukan sejumlah bimbingan. "Kami bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar berpengalaman, untuk menghitung tingkat kelulusan siswa berdasarkan data SNBP tahun sebelumnya," kata Kepala SMAN 1 Banjarmasin Fery Setyawan Anadhy, Senin.

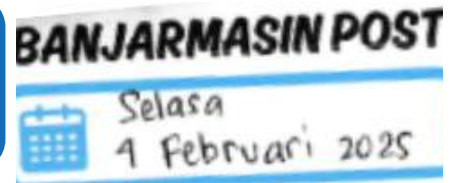
Fery juga mengatakan pihaknya akan mendampingi siswa melakukan proses pendaftaran. "Kami susah siapkan operator di lab komputer, apabila ada siswa yang perlu bantuan," jelasnya. (lis/mel)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa



# Tuntut Pembayaran Tukin Dirapel

■ Puluhan Dosen ASN Saintek Gelar Aksi di Kampus ULM

**BANJARMASIN, BPOST** - Puluhan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Bidang Sains dan Teknologi (Salutek) di Kalimantan Selatan menggelar aksi solidaritas, Senin (3/2).

Aksi ini dipusatkan di depan General Building Universitas Lambung Mangkurat

(ULM) Kampus Banjarmasin, menuntut pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja (tukin) yang menjadi hak mereka.

Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Rafeset membawa sejumlah poster bernada tuntutan dan

● Hal 1 kol 4-7

### TUNTUTAN DOSEN ASN

- Minta rapelan tukin yang belum dibayarkan dari tahun 2020 hingga 2024
- Mendesak agar pemberian tukin berlaku untuk semua dosen ASN tanpa membedakan satuan kerja (saker)
- Minta agar tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen dipisahkan tanpa ada perhitungan selisih

## Tuntut...

● Sambutan Hal 3

sindiran, seperti "Tukin Hak Kami, Kewajiban Negara", "Negara Berhutang! Lunasi Tukin Dosen Segera!", serta "No Tukin No Good Service, No Good Education".

Tak hanya itu, sebuah spanduk besar bertuliskan "Jangan Koler Bayar Hutang Tunjangan Kinerja untuk Dosen 2020-2024" turut dibentangkan sebagai bentuk protes.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan solidaritas nasional yang terpusat di

Jakarta.

Sebelum memulai orasi, para dosen di ULM turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan terhadap Tanah Air meski tengah menyuarakan hak mereka.

Koordinator aksi, Juliya-iti Putri Utami, menyatakan para dosen menuntut tiga hal utama. "Kami menuntut rapelan tukin yang belum dibayarkan dari tahun 2020 hingga 2024," ujarnya saat bernaras.

Selain itu, mereka juga mendesak agar pemberian tukin berlaku untuk semua

dosen ASN tanpa membedakan satuan kerja (saker), baik di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) maupun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

"Kami menginginkan tukin for all, tanpa adanya perbedaan," tegasnya.

Tuntutan ketiga, mereka meminta agar tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dipisahkan tanpa ada perhitungan selisih.

"Kami ingin tukin tetap diberikan penuh terlepas dari adanya serdos. Tukin sendiri, serdos sendiri," jelas

Juliya-iti.

Aksi ini juga merupakan bentuk solidaritas terhadap ribuan dosen ASN di Jakarta yang menggelar unjuk rasa serupa di depan Istana Merdeka. "Bayangkan, hanya dosen di bawah Kemendikbudsaintek yang tidak mendapatkan tukin. Ini bukan bentuk keadilan. Kami hanya menuntut hak kami dibayar dan diperlakukan setara," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemendikbudsaintek terkait tuntutan para dosen tersebut. (max)

## Ingin Jadi...

● Sambutan Hal 3

saat ini masih terus berjuang," ujarnya, Senin (3/2).

Wanita yang memiliki hobi menyanyi ini mengakui men-

jadi PNS adalah cita-cita sejak dulu.

"Menuju cita-cita tersebut, banyak hal yang memang masih perlu perjuangan tapi alhamdulillah ada beberapa tahap yang sudah saya selesaikan yakni mampu meny-

lesaikan pendidikan dengan tepat waktu sampai dengan profesi guru," ujarnya.

Meski baru honor saat ini, ia pun mengakui itu suatu pencapaian yang patut disyukuri.

"Saya senang, karena

pencapaian ini juga berkat dukungan dari keluarga khususnya sangat membantu dan memotivasi saya untuk terus melangkah mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang guru berstatus PNS," pungkasnya. (nan)



Universitas  
LAMBUNG MANGKURAT  
Waja Sampai ka Puting

**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
4 Februari 2025



## Rektorat Minta Tak Mogok Mengajar

WAKIL Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Rusmin Nuryadin, membenarkan dukungan penuh terhadap aksi yang digelar oleh puluhan dosen ASN Kemendiknasintek di Kalimantan Se-

● Hal 11 kol 1-3

### Rektorat...

● Sambungan Hal 9

latan, Senin (3/2).

Dalam pernyataannya, Rusmin menegaskan, pihak rektorat ULM selalu memperjuangkan hak-hak dosen dalam setiap pertemuan dengan kementerian terkait.

Ia mengungkapkan, dalam setiap rapat dengan kementerian, pihak universitas terus menyampaikan bahwa tuntutan dosen ASN adalah sah. Karena menurutnya, mereka me-

rasa terzalimi dibandingkan dosen dari kementerian lain yang sudah menerima hak mereka sejak lama.

"Ini adalah tuntutan yang sah dari para dosen ASN yang selama ini terzalimi. Kami sudah memperjuangkannya dalam setiap rapat dengan kementerian, dan kami berharap pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan masalah ini," ungkap Rusmin.

Rusmin juga menanggapi wacana mogok mengajar yang diusulkan oleh para dosen. Meskipun ia memahami

frustrasi para dosen, Rusmin berharap mogok mengajar tidak menjadi solusi.

"Saya kira, mogok mengajar bukanlah solusi. Mengajar adalah kewajiban kita sebagai dosen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa," ujar Rusmin.

Ia menambahkan, diskriminasi terhadap dosen ASN di Kemendiknasintek harus segera dihentikan. Rusmin berharap perhatian dari Presiden RI, Prabowo Subianto, serta kementerian dan DPR RI agar masalah ini segera diselesaikan. (msr)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
4 Februari 2025

**Insight**  
**Ingin Jadi PNS**

**NUR** Sylla saat ini sedang dalam proses belajar untuk menjadi PNS. Dia ingin bekerja di instansi pemerintahan.

Perempuan asal Kotabaru ini mengaku, saat ini dia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS. Dia ingin bekerja di instansi pemerintahan.

"Target saya adalah menjadi seorang guru dengan status PNS dan,"

● **Hal 11 bab 4-7**

**Si Jago Debat ULM Ini Dijuluki Putri Tidur**

**BANJARMASIN, BPOST** - Di balik ketajaman argumen dan kepiawaiannya di arena debat, Hugo Sinda Tajana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), justru dikenal di kalangan teman-temannya dengan julukan Putri Tidur.

Hai itu dia sampai saat ini beribadah dalam program Young Chat Banjarmasin Post, Senin (3/2).

Mahasiswa semester enam asal Banjarmasin ini beribadah dalam program Young Chat Banjarmasin Post, Senin (3/2).

● **Hal 11 bab 4-7**

**BERSINCRANG** - Tajana saat beribadah dalam program Young Chat Banjarmasin Post, Senin (3/2).

● **Hal 11 bab 4-7**

**Si Jago...**

● **Banjarmasin Post 5**

salah satunya yang dia miliki. Dia yang sudah diakui sebagai jago debat di kalangan teman-temannya, baik di dalam maupun luar kampus.

Di lingkungan akademis, Mia tergabung dalam Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskursi Hukum (LPD-DH) yang bergerak di bidang penelitian dan diskusi hukum. Tak hanya itu, dia juga

menjadi delegasi Fakultas Hukum dalam kompetisi debat hukum tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Di luar kampus, Mia aktif dalam Gerakan Pemuda Indonesia (GPI), sebuah komunitas binaan Bank Indonesia yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan literasi keuangan.

"Memeritka, jadi mahasiswa itu penting. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini," ujarnya.

Sementara berprestasi Mia mengaku bukan datang dari dorongan orang tua, melainkan dari dirinya sendiri.

Sejak SD, dia sudah aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti Dokter Cilik, Pramuka Hijau, dan berbagai lomba lainnya. Minatnya terhadap debat muncul saat SMA, setelah melihat bahwa sekolahnya memiliki sebuah debat yang produktif.

Di balik segala keibadahan dan prestasinya, Mia punya hobi yang unik yang membuatnya mendapat julukan Putri Tidur.

"Kalau ada waktu luang, aku pasti tidur. Teman-teman sempat menjulukinya Putri Tidur karena aku sering memandangkan jam istirahat di sela-sela busa tidur," ungkapnya.

Namun, dia bukan sebenarnya hobi. Dia juga hobi menyanyi, bermain gitar, menonton drama, dan membaca buku. Meski dikenal sebagai sosok yang antusias, dia tetap menjaga kesibukannya.

"Produktif itu bagus, tapi jangan sampai lupa istirahat," pesannya. (dita)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## BARITO POST



Selasa  
4 Februari 2025



BARITO Post: Demonstrasi dosen ASN di kampus ULM menuntut pemerintah untuk membayar tunjangan kinerja (tukin) mereka. (1/2/2025). Foto: Barito Post

### Wakil Rektor ULM Nilai Tuntutan Dosen Itu Sebuah Hak dan Positif

**Banjarmasin, BARITO** – Demonstrasi tuntutan pembayaran 'tukin' oleh para dosen ULM mendapat dukungan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Iwan Afflame. Kata Iwan, tuntutan pembayaran Tunjangan Kinerja (tukin) yang dilakukan oleh dosen ASN di Universitas Lambung Mangkurat itu positif dan merupakan sebuah kewajiban menurut hukum mereka.



Dosen ASN demo menuntut pembayaran tukin di ULM.

petakan perhatian serius dari Kementerian, DPR maupun pihak terkait lainnya, Iwan berpendapat, demonstrasi sendiri adalah sebuah negara demokrasi, sedangkan memenuhi hak-hak norma yang berlaku, diperkannya pada Dasar hukum dari Eka dalam kepemimpinan seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 25 ayat (1). "Setiap orang berhak atas pekerjaan, dan mendapatkannya dengan adil, termasuk dalam hal ini, dosen ASN yang berhak atas tunjangan kinerja yang layak sehingga bisa

memberikan dedikasi yang terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia," ujar Iwan.

Namun ia menegaskan, selain menuntut hak, para dosen juga harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal pelaksanaan. Ti. Dalam Pengurus Trigop, "Semoga Pendidikan di Indonesia semakin maju dan jaya."

Sementara itu, puluhan dosen ASN mengantar aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kampus Banjarmasin. Mereka menuntut, Kementerian Pendidikan Trigop, Sains dan Teknologi (Kemendiknasristekdikti) segera memproses tuntutan kinerja yang belum diterima sejak 2020.

Tuntutan mereka meminta agar tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen diproses tanpa ada penundaan sekecil apa pun.

### Hanya Dibayar 202 Kemendiktisaintek Tolak Rapel

Banjarmasin, BARITO - Ribuan dosen aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa, Senin (3/2/2025), menuntut pemerintah membayar tunjangan kinerja (tukin) mereka yang tertunggak sejak 2020. Di Kalimantan Selatan, aksi para dosen tersebut digelar di kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Unjuk rasa yang berlangsung di halaman Gedung Lecture The kampus ULM Kayutangi itu diikuti ratusan perwakilan dosen ASN dari tiga perguruan tinggi di Kalsel, yakni U Politeknik Negeri Banjarmasin (Polib dan Politeknik Negeri Tanah I (Politala).

Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Kalsel membawa sejumlah poster bernafas i tutan dan sindiran.

"Jangan Koler Bayar Hak K Tunjangan Kinerja Dosen 2020-2025 demikian bunyi tuntutan yang terpang di spanduk panjang.

Selain itu, ada pula poster-po bertuliskan 'Tukin Harga Mati', 'Tu Hak Kami, Kewajiban Negara', 'Nej Berhutang? Lunasi Tukin Dosen Segera', 'No Tukin No Good Service, Good Education'.

Rahmida Erliyani, salah satu peserta aksi, meminta pemerintah supaya memberikan solusi atas pemadaman ini. "Y kami menuntut di sini adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah dengan membayarkan hak kami, sebagai dosen, dari tahun 2020 hingga 2025."

Bersambung ke hal 02

### ULM Minta Dosen tak Mogok Mengajar

**Banjarmasin, BARITO** – Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Muhammad Rusmin Nuryadin menyatakan pihak rektorat mendukung penuh aksi para dosen aparatur sipil negara (ASN) menuntut dibayarnya tunjangan kinerja (tukin) sejak 2020.

Menurut dia, pimpinan universitas terus memperjuangkan hak-hak para dosen tersebut dalam berbagai pertemuan dengan kementerian terkait.

"Dalam setiap rapat dengan kementerian, kami selalu

menyampaikan bahwa ini adalah tuntutan yang sah dari para dosen ASN yang selama ini terzalimi oleh pemerintah. Ini, ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni itu kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Rusmin pun berharap Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan DPR menunjukkan perhatian khusus untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Diskriminasi seperti ini seharusnya tidak terjadi," tambahnya.

Terkait wacana mogok mengajar, Rusmin mengaku memahami frustrasi para dosen. Namun, dia berharap hal itu tidak sampai menjadi kenyataan.

"Saya kira mogok mengajar bukanlah solusi. Mengajar

haruslah terus dilakukan."

### ULM Minta...

adalah kewajiban kita sebagai dosen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa," ujarnya.

Wakil Rektor ULM Bidang Akademik Iwan Afflame juga menyampaikan dukungan atas aksi para dosen itu.

Dia menilai, tuntutan pembayaran tukin yang diperjuangkan para dosen ASN se Indonesia, termasuk dosen di ULM, merupakan hal yang positif. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Kementerian, DPR

maupun pihak terkait lainnya. "Demonstrasi sendiri adalah sesuatu hal lazim di sebuah negara demokrasi, sepanjang mematuhi kaidah dan norma yang berlaku," ucapnya.

"Saya berharap tukin

### Sambungan hal 1

dosen segera dibayarkan, kemudian dosen merasakan kesejahteraan yang layak sehingga bisa memberikan dedikasi yang terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia," demikian Iwan Afflame dan imnya



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BARITO POST

Selasa  
4 Februari 2025

# Dosen ASN se Indonesia Tagih Tukin

## Dosen ASN...

Jika ditanyakan, maka kondisi ini menunjukkan diskriminasi terhadap dosen ASN di Kemendiknas. Sebab, dosen maupun guru dari kementerian lain telah menerima hak mereka sejak lama.

Kemarin, bahkan ada rencana dari Adaksi untuk mogok mengajar selama satu semester. Tapi itu masih sebatas wacana, kami menunggu komando dari pusat, tuturnya.

Koordinator aksi, Jolyatin Putri Utami, mengatakan aksi untuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang dilakukan para dosen ASN yang terpusat di depan Istana Merdeka Jakarta.

Para dosen menuntut tiga hal utama dalam aksi ini. Pertama, mereka menuntut agar tukin mereka sejak 2020 hingga 2024 segera dibayar yang saat ini menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiknas).

Kami menuntut rapelan tukin yang belum dibayarkan dari tahun 2020 hingga 2024, katanya. Kemudian mereka mendesak agar pemberian tukin berlaku untuk semua dosen ASN tanpa membedakan satuan kerja (satker), baik di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) maupun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Kami menginginkan tukin for all, tanpa adanya perbedaan, tegasnya.

Tuntutan ketiga, mereka meminta agar tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dipisahkan tanpa ada perhitungan selisih.

Kami ingin tukin tetap diberikan penuh terlepas dari adanya serdos. Tukin sendiri, serdos sendiri, jelas Jolyatin.

Bayangkan, hanya dosen di bawah Kemendiknas yang tidak mendapatkan tukin. Ini bukan bentuk keadilan. Kami hanya menuntut hak kami dibayar dan dipisahkan secara pungkasan.

Sementara itu, aksi ratusan dosen ASN Kemendiknas dari seluruh Indonesia, yang akan bergerak menuju Istana Merdeka, diadakan sekitar

Anggun Gunawan mengungkapkan, mereka tidak bisa merapat ke Istana Merdeka dan hanya diizinkan demo di Patung Kuda.

Anggun mengatakan aksi demonstrasi menuntut pembayaran tukin ini dilakukan langsung kepada Presiden Prabowo. Hal ini, sebagai langkah lanjutan setelah aksi Adaksi dalam menyuarakan hak dosen ASN selama ini tak digubris oleh Kemendiknas.

"Karena kami selama ini tidak pernah digubris oleh Kemendiknas," kata Soemantri Brodhonoro, maka kami untuk aksi kali ini fokus kepada Presiden Prabowo, ujarnya kepada wartawan.

Adaksi menilai, dalam persoalan ini Presiden dapat menggunakan hak prerogatif yang ia miliki sebagai kepala negara. Yakni, hak untuk membuat keputusan strategis yang dapat diambil tanpa proses legislatif.

Jadi kami berharap Presiden Prabowo, melalui kekuasaan pemberian kebijakan hukum yang sama kepada hakim seperti ketika membatalkan kebijakan PTN 12 persen, ujar Anggun.

Satu bulan sebelumnya, Adaksi berunjuk rasa dengan tuntutan serupa di depan gedung Kemendiknas Jakarta. Demonstrasi itu mendapat respons Kemendiknas dengan janji memperjuangkan tuntutan para dosen.

Kemendiknas dan Badan Anggaran DPR lantas menandatangani tuntutan itu dengan membahas penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Badan Anggaran menyetujui tambahan anggaran Rp2,5 triliun dari usulan Rp2,8 triliun di Kemendiknas.

Namun, tambahan anggaran itu bukan untuk membayar tunjangan kinerja dosen yang tertunda sejak 2020. Tambahan anggaran tersebut justru hanya dialokasikan untuk kebutuhan tunjangan kinerja 2025.

Para dosen tidak terima atas keputusan tersebut. Dosen bersama Adaksi tetap berkekuatan meminta

penuh, ujar Anggun.

Dalam aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, ratusan dosen yang hadir sebagai perwakilan dosen ASN di Indonesia mengajukan dua tuntutan.

Pertama, yakni mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembayaran tukin di tahun 2025 sesegera mungkin tanpa diskriminasi. Artinya, pembayaran diberikan kepada 80 ribu dosen ASN di Indonesia tanpa memandang penempatan.

Karena kami mengusulkan aspirasi tukin for all, atau tukin untuk semua. Jadi pembayarannya berkeadilan," kata Anggun.

Dia melanjutkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membayar tukin dosen sebagai salah satu program quick win Presiden. Anggun berharap Prabowo mau memperhatikan kesejahteraan dosen ASN, melalui berbagai upaya Adaksi dalam memperjuangkan pembayaran tukin.

"Jadi kami berharap Pak Prabowo terbuka hatinya untuk memperhatikan kesejahteraan dosen, karena kata Mendiknas tukin dosen merupakan salah satu program quick win Pak Prabowo, sehingga kami berharap Presiden memiliki itikad yang baik untuk membayarkan tukin ini," ujar dia.

Menanggapi tuntutan para dosen ASN itu, Sekretaris Jenderal Kemendiknas, Togar Manghiut Simatupang, Togar M. Simatupang menegaskan pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN dalam kurun waktu 2020-2024 tidak bisa dihapus karena kementerian pada saat itu (Kemendikbud era Nadiem Makarim) tidak mengajukan anggaran tukin dosen ASN melalui birokrasi yang semestinya.

Ini sudah tutup buku dan kebutuhan parsial karena ketidaksempatan dari kementerian yang lalu,"

Togar menyebutkan tukin untuk dosen ASN Kemendiknas pada periode 2020-2024 tidak bisa dicairkan karena kementerian pada saat itu (Kemendikbud era Nadiem Makarim) tidak mengajukan anggaran tukin dosen ASN melalui birokrasi yang semestinya. "Ini sudah tutup buku dan kebutuhan parsial karena ketidaksempatan dari kementerian yang lalu,"

## Sambungan hal 1

menafikan perjuangan (para dosen ASN), demikian kenyataan yang terjadi. Perjuangan sudah dilakukan dan itu di luar dari jangkauan otoritas yang ada, ujarnya.

Sebagai gantinya, imbuh Togar, tukin bagi dosen ASN pada 2025 telah dianggarkan dan disetujui pemerintah sebesar Rp 2,5 triliun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Mengenai perkiraan kapan pembayaran tunjangan kinerja bisa diselesaikan, dia menyebutkan pihaknya sedang dalam proses melakukan pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN 2025.

"Prosesnya sedang berjalan dan proses birokrasi coba untuk dipenuhi," kata dia. Togar pun berharap aksi para dosen ASN Kemendiknas ini tidak mengganggu layanan publik, terutama tugas perkuliahan dan tridharma lainnya.

Menurut Togar, pihaknya menyadari tiga langkah dalam menanggapi aksi Aliansi Dosen ASN itu. Pertama, kata Togar, adalah memantau perkembangan aksi yang dilakukan oleh Adaksi. Meskipun ia mengakui bahwa langkah ini bukan merupakan langkah yang optimal.

Kedua, Togar mengimbau agar ASN tetap berdiri di belakang. Ia menekankan bahwa dosen ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki kode etik yang harus dijunjung, sehingga perlu bersikap santun dan objektif.

Selain itu, Togar juga menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari pimpinan masing-masing perguruan tinggi mengenai apakah para dosen ASN tersebut telah mendapatkan izin untuk turun ke jalan dan menggelar aksi. "Atau menggunakan kanal yang tersedia dalam komunikasi yang sehat," kata dia.

Togar mengaku prihatin terhadap aksi demonstrasi tersebut lantaran aparat sipil negara, termasuk dosen, pada dasarnya mempunyai mekanisme sendiri dalam menanggapi aspirasi

Istana Merdeka Jakarta.

Para dosen menuntut tiga hal utama dalam aksi ini. Pertama, mereka

menuntut agar tukin mereka sejak 2020 hingga 2024 segera dibayar yang saat ini menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiknas).

Kami menuntut rapelan tukin yang belum dibayarkan dari tahun 2020 hingga 2024, katanya.

Kemudian mereka mendesak agar pemberian tukin berlaku untuk semua dosen ASN tanpa membedakan satuan kerja (satker), baik di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) maupun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Kami menginginkan tukin for all, tanpa adanya perbedaan, tegasnya. Tuntutan ketiga, mereka meminta agar tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dipisahkan tanpa ada perhitungan selisih.

Kami ingin tukin tetap diberikan penuh terlepas dari adanya serdos. Tukin sendiri, serdos sendiri, jelas Jolyatin.

Bayangkan, hanya dosen di bawah Kemendiknas yang tidak mendapatkan tukin. Ini bukan bentuk keadilan. Kami hanya menuntut hak kami dibayar dan dipisahkan secara pungkasan.

Sementara itu, aksi ratusan dosen ASN Kemendiknas dari seluruh Indonesia, yang akan bergerak menuju Istana Merdeka, diadakan sekitar Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Ketua Aliansi Dosen Kemendiknas Seluruh Indonesia (Adaksi) untuk aksi kali ini fokus kepada Presiden Prabowo, ujarnya kepada wartawan.

Adaksi menilai, dalam persoalan ini Presiden dapat menggunakan hak prerogatif yang ia miliki sebagai kepala negara. Yakni, hak untuk membuat keputusan strategis yang dapat diambil tanpa proses legislatif. "Jadi kami berharap Presiden Prabowo, melalui kekuasaan pemberian kebijakan hukum yang sama kepada hakim seperti ketika membatalkan kebijakan PTN 12 persen, ujar Anggun.

Satu bulan sebelumnya, Adaksi berunjuk rasa dengan tuntutan serupa di depan gedung Kemendiknas Jakarta. Demonstrasi itu mendapat respons Kemendiknas dengan janji memperjuangkan tuntutan para dosen.

Kemendiknas dan Badan Anggaran DPR lantas menandatangani tuntutan itu dengan membahas penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Badan Anggaran menyetujui tambahan anggaran Rp2,5 triliun dari usulan Rp2,8 triliun di Kemendiknas.

Namun, tambahan anggaran itu bukan untuk membayar tunjangan kinerja dosen yang tertunda sejak 2020. Tambahan anggaran tersebut justru hanya dialokasikan untuk kebutuhan tunjangan kinerja 2025.

Para dosen tidak terima atas keputusan tersebut. Dosen bersama Adaksi tetap berkekuatan meminta pemerintah membayar tunjangan kinerja mereka selama lima tahun terakhir. "Sehingga kami melakukan demonstrasi menuntut pembayaran tunjangan kinerja secara

semua. Jadi pembayarannya berkeadilan," kata Anggun.

Dia melanjutkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membayar tukin dosen sebagai salah satu program quick win Presiden. Anggun berharap Prabowo mau memperhatikan kesejahteraan dosen ASN, melalui berbagai upaya Adaksi dalam memperjuangkan pembayaran tukin.

"Jadi kami berharap Pak Prabowo terbuka hatinya untuk memperhatikan kesejahteraan dosen, karena kata Mendiknas tukin dosen merupakan salah satu program quick win Pak Prabowo, sehingga kami berharap Presiden memiliki itikad yang baik untuk membayarkan tukin ini," ujar dia.

Menanggapi tuntutan para dosen ASN itu, Sekretaris Jenderal Kemendiknas, Togar Manghiut Simatupang, Togar M. Simatupang menegaskan pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN dalam kurun waktu 2020-2024 tidak bisa dihapus karena kementerian pada saat itu (Kemendikbud era Nadiem Makarim) tidak mengajukan anggaran tukin dosen ASN melalui birokrasi yang semestinya.

Ini sudah tutup buku dan kebutuhan parsial karena ketidaksempatan dari kementerian yang lalu," kata Togar.

Hal tersebut, menurut Togar, tidak memenuhi prosedur birokrasi atau kepatuhan yang lengkap, serta tak dapat diulang akibat tutup buku. "Tanpa

dosen ASN 2025. Prosesnya sedang berjalan dan proses birokrasi coba untuk dipenuhi," kata dia. Togar pun berharap aksi para dosen ASN Kemendiknas ini tidak mengganggu layanan publik, terutama tugas perkuliahan dan tridharma lainnya.

Menurut Togar, pihaknya menyadari tiga langkah dalam menanggapi aksi Aliansi Dosen ASN itu. Pertama, kata Togar, adalah memantau perkembangan aksi yang dilakukan oleh Adaksi. Meskipun ia mengakui bahwa langkah ini bukan merupakan langkah yang optimal.

Kedua, Togar mengimbau agar ASN tetap berdiri di belakang. Ia menekankan bahwa dosen ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki kode etik yang harus dijunjung, sehingga perlu bersikap santun dan objektif. Selain itu, Togar juga menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari pimpinan masing-masing perguruan tinggi mengenai apakah para dosen ASN tersebut telah mendapatkan izin untuk turun ke jalan dan menggelar aksi. "Atau menggunakan kanal yang tersedia dalam komunikasi yang sehat," kata dia.

Togar mengaku prihatin terhadap aksi demonstrasi tersebut lantaran aparat sipil negara, termasuk dosen, pada dasarnya mempunyai mekanisme sendiri dalam menanggapi aspirasi



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN

Senin  
3 Februari 2025

# Evaluasi Responsivitas Kurikulum Merdeka, Hambatan atau Hambatan Menuju Deep Learning?



Oleh  
SYAIFULLAH<sup>1)</sup>

sudah dituntut untuk kreatif dalam memberikan materi pelajaran. Di samping itu juga telah menyesuaikan keinginan siswa terkait cara belajar yang nyaman. Hanya saja, ada beberapa siswa yang mungkin salah tangkap dalam memahaminya.

Perubahan metode pengajaran menjadi kendala utama. Guru harus beradaptasi dengan pendekatan baru yang lebih interaktif dan memberikan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang inovatif.

Hal ini membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan proyek berbasis masalah.

Akses terhadap teknologi juga menjadi tantangan. Implementasi deep learning sering kali memerlukan penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti analisis data siswa dan pembelajaran berbasis internet. Di daerah terpencil atau kurang berkembang, akses terhadap teknologi ini mungkin terbatas sehingga menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Ada resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak. Beberapa pendidik dan institusi mungkin merasa nyaman dengan metode pengajaran tradisional dan ragu untuk beralih ke pendekatan baru. Ketidaksiapan tentang efektivitas deep learning dibandingkan dengan metode yang sudah ada juga dapat menyebabkan keraguan dalam penerapan.

Deep learning dalam konteks pendidikan dapat menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, terutama dalam mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif. Semoga perubahan model kurikulum tidak membawa beban baru bagi tenaga pendidik, tetapi menata lebih sederhana sehingga efektivitas pendampingan terhadap peserta didik

tetap menjadi prioritas utama.

Banyak pihak yang tidak setuju dengan perubahan kebijakan kurikulum yang terus-menerus disebabkan oleh berbagai tantangan dan dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu alasan utama adalah resistensi dari para pendidik, termasuk guru dan staf sekolah, yang merasa tidak nyaman atau tidak siap untuk mengadopsi model pembelajaran baru.

Perubahan kurikulum sering kali memerlukan pelatihan yang intensif dan waktu yang cukup untuk penyesuaian, namun banyak guru mengalami kesulitan dalam pelatihan ini karena kurangnya waktu atau rencana pelatihan yang efektif.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala signifikan. Implementasi perubahan kurikulum memerlukan investasi besar dalam hal pelatihan guru, alat pembelajaran baru, dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Keterbatasan anggaran sering kali menghambat kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan ini.

Dampak negatif dari perubahan kurikulum yang terus-menerus juga menjadi perhatian. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru, yang dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Ketidaksiapan ini dapat mengganggu visi dan misi sekolah serta merusak kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, implementasi yang inkonsisten di berbagai jenjang pendidikan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan siswa dan orang tua. Perbedaan penafsiran dan penerapan kurikulum di berbagai sekolah dapat menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menciptakan keraguan di kalangan pendidik dan masyarakat mengenai efektivitas perubahan kebijakan kurikulum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terencana dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan ini agar perubahan kurikulum dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan.

Fenomena di mana menteri baru cenderung mengubah kebijakan dan aturan lama demi menciptakan proyek baru mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks dalam pengambilan keputusan publik.

Salah satu alasan utama adalah keinginan menteri untuk meninggalkan jejak yang jelas selama masa

jabatannya, sehingga mereka berusaha membangun legitimasi dengan memperkenalkan kebijakan atau proyek baru yang dianggap lebih relevan. Selain itu, kepentingan pribadi dan agenda politik menteri baru sering kali mempengaruhi keputusan mereka, di mana mereka merasa bahwa kebijakan lama tidak sejalan dengan visi mereka atau kebutuhan masyarakat saat ini.

Ada juga kecenderungan untuk melihat kebijakan lama sebagai bagian dari "status quo" yang perlu diubah, dengan anggapan bahwa inovasi diperlukan untuk mengatasi tantangan baru dalam sistem pendidikan atau sektor lainnya. Dalam banyak kasus, tekanan untuk menunjukkan hasil yang cepat membuat menteri merasa bahwa mengganti kebijakan lama lebih efisien daripada mencoba memperbaiki atau menyesuikannya.

Selain itu, kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan lama dapat mendorong keputusan untuk mengambil langkah tegas dengan menggantinya demi meningkatkan kualitas layanan publik.

Pengaruh lobi dari kelompok tertentu, seperti perusahaan swasta atau organisasi non-pemerintah, juga dapat berperan dalam perubahan kebijakan yang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, meskipun perubahan diperlukan untuk adaptasi terhadap tantangan baru, penting bagi setiap pemimpin untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan yang ada serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perubahan tersebut. Pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti dapat membantu memastikan bahwa perubahan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan pencapaian yang telah diraih sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi dengan perkembangan zaman, implementasinya yang tidak terencana dan kurang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat merusak sistem pendidikan secara keseluruhan.

Diharapkan dunia pendidikan dapat mengatasi tantangan akibat perubahan kebijakan yang terus-menerus dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta masyarakat. (\*)/ad/ibx

<sup>1)</sup> Dosen FKIP Bahasa Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Pembina Lembaga Pemahaman FKIP (LPM)

KITA harus jujur. Dunia pendidikan kita sekarang tidak baik-baik saja. Selalu saja ada dramanya. Mulai dari raman anak-anak (TK) hingga perguruan tinggi. Di taman kanak-kanak (TK) pembelajaran matematika jadi polemik. Di perguruan tinggi, kampus menjelma menjadi lembaga otoritarian terhadap mahasiswanya.

Miris. Saat pendidikan di negara lain sudah melangkah maju, kita masih jalan di tempat. Sialnya, perdebatan perihal pendidikan ini selalu dimulai setiap pergantian pos menteri. Ganti menteri pasti ganti gaya. Inilah yang pasti mengubah kebijakan.

Seperti sekarang, menteri pendidikan di Kabinet Merah Putih (KMP) yang menggantikan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah mengumumkan adanya perubahan metode belajar. Perubahan perubahan ini tidak hanya mempengaruhi aspek teknis dalam pendidikan, tetapi juga mempengaruhi mentalitas guru, dosen dan peserta didik secara negatif.

Sementara Kurikulum Merdeka diakui sebagai langkah positif yang mengadopsi prinsip-prinsip dari sistem pendidikan negara maju, tantangan terletak pada ketidaksiapan apakah kebijakan ini akan berkelanjutan ketika ada perubahan dalam pemerintahan. Hal ini harus dipertimbangkan dengan serius untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak terus-menerus terkena dampak dari perubahan kebijakan yang terlalu sering.

Secara teoretis, Kurikulum Merdeka sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang mendasarkan pada prinsip kemerdekaan. Ki Hadjar Dewantara pernah menyatakan bahwa pendidikan sejati adalah yang memerdekaan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Idealisasi Kurikulum Merdeka yang menekankan partisipasi aktif guru dan peserta didik memiliki keterkaitan erat dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

Namun, semua upaya ini sudah sia-sia jika "setiap ganti menteri, ganti kebijakan," seperti yang dinyatakan oleh Prof HAB Tilaar dalam bukunya "Kelasidologi Pendidikan Nasional," masih menjadi kenyataan dalam politik dan pemerintahan kita. Keberlanjutan kebijakan pendidikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak, sehingga dapat dibentuk sebagai panduan yang konsisten untuk mencapai hasil pendidikan yang terbaik demi masa depan yang gemilang bagi generasi bangsa ini.

Perbincangan mengenai perubahan kurikulum kembali mengemuka pasca pernyataan Menteri Pendidikan

Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, yang mengagaskan penerapan Kurikulum Deep Learning. Kurikulum ini dirancang untuk menggabungkan tiga elemen kunci: mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning.

Gugasan ini menjadi upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam, relevan, dan menyenangkan bagi generasi muda Indonesia. Transformasi dari Kurikulum Merdeka menuju Deep Learning bukanlah upaya untuk menggantikan atau meniadakan pencapaian sebelumnya, melainkan memperkuat fondasi yang telah ada.

Pendekatan berbasis proyek (project-based learning), pemecahan masalah (problem-solving), serta penguatan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas telah menjadi inti dari Kurikulum Merdeka. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pendalaman materi dan keterampilan aplikatif.

Belajar dari negara-negara maju seperti Finlandia, Kanada, dan Singapura yang telah lebih dahulu mengimplementasikan konsep deep learning, Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan ini dengan mempertimbangkan konteks lokal.

Nilai-nilai seperti gotong royong, kebhinekaan, dan toleransi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Sebagai contoh, pembelajaran berbasis proyek dapat mengangkat tema pelestarian budaya lokal atau pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar menyelesaikan masalah, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air.

Penerapan deep learning dalam pendidikan membawa sejumlah tantangan unik. Kesenjangan digital, kurangnya persiapan guru, dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama di sekolah. Di perguruan tinggi, tantangan lainnya terletak pada pengembangan metodologi penelitian yang baru, kolaborasi lintas disiplin, dan isu etika dalam penggunaan AI. Selain itu, kekhawatiran akan ketergantungan berlebihan pada teknologi, privasi data, dan biaya implementasi juga menjadi perhatian.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan pengembang teknologi. Solusi yang potensial meliputi pengembangan kompetensi digital, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penguatan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Terkait penerapan, Guru saat ini

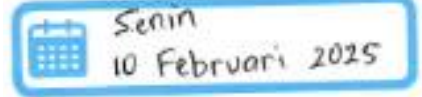


## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN



# Dampak Ekonomi Haul Guru Sekumpul: Perspektif Inflasi di Kalimantan Selatan

**HAUL** Guru Sekumpul merupakan salah satu acara keagamaan terbesar di Kalimantan Selatan yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi lokal. Setiap tahun, jutaan jemaah dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, datang ke Martapura dan Banjarbaru. Kehadiran massa ini tentu mempengaruhi dinamika ekonomi, khususnya terhadap tingkat inflasi yang menjadi perhatian utama dalam analisis ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan melaporkan terjadi inflasi year-on-year (y-o-y) sebesar 0,62 persen pada Januari 2025. Meski angka ini terlihat moderat, penting untuk mencermati faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut, salah satunya adalah pelaksanaan Haul Guru Sekumpul. Menariknya, BPS juga mencatat deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,76 persen dan deflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 0,76 persen. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika harga yang kompleks, di mana inflasi tahunan terjadi bersamaan dengan deflasi bulanan.

### Mengapa Inflasi Terjadi Meski Banyak Layanan Gratis?

Meskipun banyak makanan dan transportasi disediakan secara gratis selama haul, inflasi tetap terjadi karena beberapa faktor ekonomi yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian layanan gratis tidak serta-merta menekan tekanan inflasi secara keseluruhan.

Pertama, tekanan permintaan di luar layanan gratis tetap tinggi. Tidak semua kebutuhan jemaah dipenuhi secara cuma-cuma. Konsumsi pribadi seperti camilan, minuman kemasan, perlengkapan pribadi, dan kebutuhan darurat tetap dibeli. Bahkan jemaah yang menerima makanan gratis sering kali melakukan pembelian tambahan untuk memenuhi preferensi pribadi mereka.

Kedua, terjadi kenaikan harga di sektor pendukung. Jasa pendukung seperti



membuat pelaku usaha menaikkan harga karena tingginya permintaan sesaat (short-term demand spike).

Ketiga, distribusi logistik yang terganggu turut menyumbang inflasi. Arus lalu lintas yang padat selama haul menyebabkan biaya distribusi barang, terutama bahan pokok, menjadi lebih mahal. Biaya tambahan ini biasanya dibebaskan ke harga jual barang, menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Keempat, terdapat efek psikologis terhadap harga. Pedagang sering kali menaikkan harga secara spekulatif saat acara besar berlangsung, meskipun tidak ada peningkatan biaya produksi yang signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai inflasi ekspektasi, di mana persepsi peningkatan permintaan mendorong harga naik secara psikologis.

Kelima, kenaikan harga komoditas tertentu tetap terjadi meskipun ada distribusi makanan gratis. Inflasi pada komoditas seperti cabai rawit, ikan patin, telur ayam, dan daging ayam ras disebabkan oleh meningkatnya permintaan bahan



Oleh

**SRI MAULIDA\***

harga di seluruh rantai pasok.

**Analisis Keterkaitan Haul Guru Sekumpul dengan Inflasi dan Deflasi**  
Sektor transportasi mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,98 persen. Lonjakan kebutuhan transportasi selama haul, baik angkutan darat maupun

mand-pull inflation), di mana tingginya permintaan terhadap jasa transportasi mendorong harga naik.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 1,45 persen. Lonjakan permintaan makanan dan minuman selama acara haul sangat berperan dalam mendorong kenaikan harga. Komoditas seperti telur ayam ras, ikan patin, ikan gabus, cabai rawit, dan daging ayam ras menjadi lebih mahal karena kebutuhan konsumsi yang meningkat drastis.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi signifikan sebesar 10,38 persen. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan pengeluaran untuk jasa kebersihan, laundry, hingga penginapan. Lonjakan tarif pada jasa-jasa tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan dari jemaah yang datang dari luar daerah.

Namun, di sisi lain, terdapat komoditas yang justru mengalami deflasi, seperti tarif listrik, bawang merah, tomat, jagung manis, buncis, bayam, kacang panjang, dan ikan papuyu. Deflasi ini terjadi

setelah acara selesai karena berkurangnya permintaan barang-barang tersebut.

Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan 107,14 pada Januari 2025 menjadi 106,33 pada Februari 2025. Hal ini menunjukkan bahwa deflasi terjadi selama haul dan penurunannya berlanjut di bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi haul jangka pendek dapat signifikan.

### Dampak dan Implikasi

Dari perspektif ekonomi, fenomena ini menunjukkan pentingnya pengelolaan kegiatan berbasis kegiatan merintah daerah di dapat memanfaatkan untuk meningkatkan namun juga perlu fluktuasi harga yang dipengaruhi daya beli. Penguatan koordinasi pengawasan harga dan distribusi barang dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendukung distribusi komoditas untuk meningkatkan kapasitas untuk mengurusi pasokan luar daerah.

Haul Guru Sekumpul menjadi peristiwa yang juga memiliki peran dalam dinamika ekonomi lokal. Dampaknya terhadap deflasi bersifat sementara, menciptakan tantangan bagi pemerintah regional. Dengan memperhatikan fenomena ini untuk mendukung kegiatan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (\*/al/sbx)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN

Semin  
10 Februari 2025

skumpul merupakan kegiatan terbesar di tahun yang tidak hanya spiritual, tetapi juga in terhadap aktivitas. Setiap tahun, jutaan jagai daerah, bahkan tang ke Martapura i. Kehadiran massal engaruhi dinamika isnya terhadap ting- menjadi perhatian ialistis ini.

Statistik (BPS) Kali- melaporkan terjadi ear (y-on-y) sebesar a Januari 2025. Meski at moderat, penting at faktor-faktor yang ubahan tersebut, sa- ah pelaksanaan Haul il. Menariknya, BPS flasi month-to-month ir 0,76 persen dan def- (y-to-d) sebesar 0,76 na ini menunjukkan ka harga yang kom- niflasi tahunan terjadi gan deflasi bulanan.

**Inflasi Terjadi Meski yak Layanan Gratis?**

ak makanan dan trans- in secara gratis selama i terjadi karena bebera- ni yang mendasarinya. dan bahwa pemberian dak serta merta mene- si secara keseluruhan. anan permintaan di itis tetap tinggi. Tidak san jemaah dipenuhi ma. Konsumsi priban, minuman kemas- an pribadi, dan kebu- tetap dibeli. Bahkan nenerima makanan ali melakukan pem- an untuk memenuhi adi mereka.

kenaikan harga di sek- penmanan, masa pemenuhan, sepe- ndry, penginapan di luar area acara, u parkir kendaraan pribadi sering kali ak gratis. Kebutuhan mendesak ini



membuat pelaku usaha menaikkan har- ga karena tingginya permintaan sesaat (short-term demand spike).

Ketiga, distribusi logistik yang ter- ganggu turut menyumbang inflasi. Arus lalu lintas yang padat selama haul menyebabkan biaya distribusi barang, terutama bahan pokok, men- jadi lebih mahal. Biaya tambahan ini biasanya dibebaskan ke harga jual barang, menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 1,45 persen. Lonjakan permintaan makanan dan minuman selama acara haul sangat berperan dalam mendorong kenaikan harga. Komoditas seperti telur ayam ras, ikan patin, ikan gabus, cabai rawit, dan daging ayam ras menjadi lebih mahal karena kebutuhan konsumsi yang meningkat drastis.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi signifikan sebesar 10,38 persen. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan penge- luaran untuk jasa kebersihan, laundry, hingga penginapan. Lonjakan tarif pada jasa-jasa tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan dari jemaah yang datang dari luar daerah.



Oleh  
SRI MAULIDA\*)

harga di seluruh rantai pasok.

### Analisis Keterkaitan Haul Guru Sekumpul dengan Inflasi dan Deflasi

Sektor transportasi mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,98 persen. Lonjakan kebutuhan transportasi sela- baik, seperti taksi, bus, dan mobil sewaan, menyebabkan kenaikan tarif yang signifikan. Fenomena ini mencermi- kan adanya tekanan permintaan (de-

mand pull inflation), di mana tingginya permintaan terhadap jasa transportasi mendorong harga naik.

Namun, di sisi lain, terdapat komoditas yang justru mengalami deflasi, seperti tarif listrik, bawang merah, tomat, jagung manis, bun- cis, bayam, kacang, cabai, dan ikan papuaya. Deflasi ini terjadi karena beberapa faktor, seperti me- linupahnya pasokan akibat panen

raya, penurunan biaya distribusi setelah acara selesai, serta ber- kurangnya permintaan terhadap barang-barang tertentu pasca haul.

Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan dari 107,14 pada Januari 2024 menjadi 106,33 pada Januari 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada inflasi y-on-y, fluktuasi harga yang terjadi selama haul diimbangi dengan penurunan harga di minggu-minggu berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak ekonomi dari haul ber- sifat jangka pendek dan musiman.

### Dampak Jangka Panjang dan Implikasi Kebijakan

Dari perspektif ekonomi pemba- ngunan, fenomena ini menunjukkan pentingnya pengelolaan ekonomi berbasis kegiatan musiman. Pe- merintah daerah dan pelaku usaha dapat memanfaatkan momen haul untuk meningkatkan pendapatan, namun juga perlu mengantisipasi fluktuasi harga yang dapat mem- pengaruhi daya beli masyarakat. Penguatan koordinasi logistik, pengawasan harga, dan pengela- an distribusi barang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah dapat menga- dopsi kebijakan yang mendukung ketahanan ekonomi, seperti menyediakan subsidi logistik sementara, mengatur distribusi komoditas strategis, serta meningkatkan kapasitas produksi lo- kal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Haul Guru Sekumpul tidak hanya menjadi peristiwa keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam dinamika ekonomi Kalimantan Selat- an. Dampaknya terhadap inflasi dan deflasi bersifat temporer dan musim- an, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pengelolaan ekonomi regional. Dengan pemahaman yang te- pat, fenomena ini dapat dioptimalkan untuk mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (\*)/al/shx)

\*)Dosen Ekon-  
Pembangunan FEB U



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Senin  
10 Februari 2025





## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## BANJARMASIN POST

Senin  
10 Februari 2025

### Koordinasi Tak Maksimal

**KENDALA** ini adalah persoalan di sistem yang tidak bisa diubah dari sekolah sebab data sudah terekam di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sehingga sekolah tidak bisa mengubah. Data siswa yang terekam pun sudah terkunci di sistem ini.

Banyak faktor yang menjadikan persoalan muncul. Pertama, Jadwal pengisian PDSS terbatas untuk jadwal Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Faktor ini menyebabkan tidak utuhnya data siswa di PDSS sehingga ini membuat para calon terganggu mengikuti SNBP.

Operator yang menginput di sekolah-sekolah tidak memiliki waktu yang cukup.

Kendatipun diminta untuk lembur, tidak semua sekolah memiliki anggaran yang cukup untuk menugaskan operator bekerja lembur.

Tidak ada alokasi dana khusus yang bisa digunakan. Kedua, sosialisasi pengisian PDSS untuk kepentingan SNBP pun tidak dilakukan jauh-jauh hari sehingga tidak ada persiapan matang secara SDM dan perangkat lunak yang mencukupi.

Pihak panitia SNBP pusat dengan sekolah-sekolah belum ada koordinasi maksimal. Akibat persoalan ini, dipastikan mereka yang barangkali dinyatakan siswa berprestasi di sekolah-sekolah tidak bisa mendaftar dan terdaftar di jalur ini.

Barangkali jalan yang tepat untuk membuka peluang lewat jalur SNBP adalah dengan mengundurkan jadwal penerimaan SNBP dan pihak sekolah diminta untuk menginput ulang siswa-siswa berprestasi yang akan didaftarkan atau mendaftar melalui SNBP.

Namun, pertanyaannya adalah apakah Kementerian Dikti Saintek akan melakukan penjadwalan ulang untuk SNBP? Ini kembali kepada komitmen kementerian terkait. Saya meyakini pimpinan sekolah dan sekolah akan bisa menyesuaikan.

Selain itu, perlu ada kebijakan khusus dari Kementerian Dikti Saintek memfasilitasi siswa berprestasi untuk mengikuti jalur lain sehingga mereka masih berpeluang di jalur penerimaan mahasiswa jalur prestasi.

Terlepas dari hal tersebut, ini menjadi pelajaran penting bagi kementerian terkait dan sekolah untuk sama-sama aktif saling menginformasikan sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa mengetahui informasi tersebut.

Solusi lain memberikan kompensasi ke siswa dengan diberikan pelatihan mengikuti seleksi PTN adalah benar.

Namun ini bukan kesalahan sekolah yang harus bertanggungjawab atas kelalaian ini. Ada panitia SNBP yang juga harus bertanggung jawab. Ini perlu kolaborasi tidak hanya sekolah.

Update rutin data siswa perlu dibuat berkala. Jangan menunggu kegiatan insidental karena ada SNBP. Untuk itu, pimpinan sekolah perlu membuat jadwal update data siswa secara berkala dan berbasis timeline.

Juga mustinya ada Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus jika Kementerian Dikti Saintek akan menjalankan satu program melibatkan sekolah-sekolah. (Iis)

NEWS  
ANALYSIS



**MOHAMMAD YAMIN**  
Pengamat Pendidikan ULM



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
11 Februari 2025



## Menulis...

● Sambungan Hal 9

berjudul Insan Terbaik yang terbit pada tahun 2021 dan juga Asrama Nomor 4 yang terbit di tahun 2022.

"Rencana ada 2 novel lagi, tapi masih dalam proses pengerjaan," kata mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tabalong ini berbincang dalam program Young Chat Banjarmasin Post, Senin (10/2).

Selain karena memang memiliki bakat menulis, diakui Raudah bahwa aktivitasnya membuat novel ini menjadi semacam wadah 'pelarian'. Dan perkuliahan tetap menjadi yang utama.

Terlebih Raudah sendiri saat ini sedang berada di semester akhir dan juga sedang mengambil skripsi. Kemudian pada rutinitas per-

kuliahan, dirinya pun kerap berhitung dengan angka dan hitung-hitungan.

"Menulis hanya hobi dan pelarian saja," jelas mahasiswa semester 8 prodi S1 Akuntansi ini.

Raudah pun mengaku dirinya awalnya tidak percaya diri dengan karyanya, bahkan dirinya pun memilih 'menyembunyikannya' dari rekan-rekannya.

"Setelah terbit novel ketiga, baru saya berani memberitahukannya kepada orang-orang. Karena saya sebagai penulis pemula, dan teman-teman saya bacanya novel-novel Tere Liye, dan takutnya dibanding-bandingkan," katanya terkekeh.

Sekarang dibebaskan oleh Raudah, setiap kali novelnya terbit dirinya justru selalu memberikan karyanya kepada teman-temannya.

"Kalau sudah terbit, sekarang saya serahkan ke teman-teman kemudian meminta masukan-masukannya juga," jelas penggemar Fiersa Besari ini.

Disinggung mengenai awal mula dirinya menulis novel, Raudah juga membeberkan di antaranya inspirasinya didapat dari kisah-kisah yang didapatinya bahkan sejak masih duduk di bangku sekolah.

"Kebetulan waktu SMA, saya jadi Ketum Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang salah satu tugasnya menjembatani sisea dengan guru BK. Dari situ banyak mendengarkan curhatan-curhatan siswa, mulai dari rumah tangga orangtuanya broken home, hingga soal pacar dan sebagainya. Jadi kisah-kisah itu juga yang saya angkat," pungkasnya. (ran)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BARITO POST**



Rabu  
12 Februari 2025

## ULM Efisiensi Pengelolaan Pagu Anggaran Rp559 Miliar

Banjarmasin, BARITO

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berkomitmen melaksanakan efisiensi pengelolaan pagu anggaran Rp559 miliar yang diperoleh tahun ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk penghematan anggaran negara.

"Saya menekankan pentingnya koordinasi yang solid untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, (11/2).

Dijelaskannya, tahun ini semua unit kerja perlu memantapkan koordinasi dan

pelaksanaan anggaran secara tepat waktu agar bisa mencapai target nasional.

Meski tahun ini pagu anggaran ULM lebih kecil dibandingkan tahun 2024 karena tidak ada lagi program revitalisasi, namun rektor menekankan justru menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen kegiatan.

Rektor juga menyoroti perlunya pemantapan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar serap anggaran lebih efektif dan efisien.

Diaknainya, serapan anggaran biasanya tinggi di akhir tahun, namun kualitas perencanaan masih rendah.

Oleh karena itu, fakultas dan unit kerja diharapkan membuat jadwal RPD yang terkoordinasi dengan baik.

Dia menegaskan pentingnya komitmen dari setiap unit kerja untuk memenuhi target RPD.

Menurut dia pada tahun 2024 ULM berada di posisi 14 secara nasional, namun lempah dalam perencanaan.

Rate-rata unit kerja hanya memenuhi target RPD selama dua bulan dalam setahun.

"Mulai tahun ini, setiap unit harus membuat surat komitmen sebagai dasar evaluasi kinerja perencanaan," tegasnya.

ant



REKTOR ULM Prof Ahmad Alim Bachri (tengah) saat memimpin acara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2025 di Banjarmasin. (Foto: Antara)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST

Rabu  
12 Februari 2025

**NEWS ANALYSIS**



**Dr Eng AKBAR RAHMAN MT**  
Pengamat Tata Kota dari ULM

## Pengembang Banjarbaru Terhambat

**SEBAGAI** ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, pembangunan di Banjarbaru makin pesat. Rencana pembangunan izin perumahan di daerah pinggir yang merupakan kawasan resapan air oleh wali kota tentu bakal berdampak terhadap pengembang.

Robi Darmawan, Direktur PT Darmamarta Graha Realty, yang tengah membangun perumahan di Jalan Golf, Landasanulin, mengatakan penangguhan izin membuat pembangunan perumahan terhambat. "Lumayan terhambat. Apalagi ini baru mengajukan perizinan. Harusnya terbit Januari, tapi tertunda. Harus menunggu aturan baru yang belum ada titik terang," ungkapnya, Selasa (11/2).

● HalSkol 4-7

### Pengembang...

● Sambutan Hal 1

Menurut Robi, mestinya setiap ada kebijakan baru, harus ada standarnya misal di mana titik banjir di Banjarbaru, di ketinggian berapa dan jangan diikut rata. "Ahemudillah saya sudah bangun di enam lokasi. Selama ini tidak ada banjir," katanya.

Dalam kondisi ini, kata Robi, pihaknya berupaya mencari alternatif lokasi. Paling logs di Kabupaten Banjar. "Blaris perumahan itu biayanya berat. Keterlambatan izin sangat memengaruhi. Jadi harus cari lokasi lain," tandas Robi.

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Kalsel Ahyat Sabini mengungkapkan setiap ada kebijakan pemerintah di 13 kabupaten/kota, pihaknya mengucyikan silaturahmi dan komunikasi. REI Kalsel pun berharap pihak pemerintah mempermudah perizinan dunia usaha, termasuk sektor properti yang masuk program Presiden Prabowo Subianto. "Apalagi ada 185 industri kutan yang menje di multiplier effect, sehingga lancarnya industri perumahan juga berdampak positif bagi industri kutan tersebut," kata Ahyat.

Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalsel Muhammad Fikri BE MM mengatakan monoton sebenarnya harus untuk evaluasi. Namun perlu pula dilihat lagi apakah monoton akan mempersulit atau mempermudah investasi.

"Sebagai pengembang yang berinvestasi di Banjarbaru, kami menggarap proyek perumahan mengikuti aturan gambar yang sudah disahkan insansi berwenang baik dan segi pembuatan jalan, drainase dan konstruksi bangunan," jelasnya.

Mengenal kawasan tetap an air, menurutnya, sudah ada peraturan daerahnya. "Kami selalu mengimbau anggota agar jangan berinvestasi di lahan yang terdampak banjir. Andalkan di tanah rawa, pasti kami sampaikan agar memperhatikan resapan dan pembuangan airnya ke mana, supaya tidak ada masalah di kemudian hari," jelas Fikri.

Pengembang yang melaksanakan pembangunan berarti sudah memperoleh izin. "Banyak anggota kami berinvestasi di Banjarbaru, ini kiranya menjadi perhatian pemerintah kota. Kalau memang ingin melakukan moratorium, dikaji benar-benar. Jangan sampai merugikan investor," tegasnya.

Apalagi Pemkot Banjarbaru harus mendukung Program Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang diarahkan pemerintah pusat.

"Kami selalu mengimbau seluruh anggota untuk tidak berinvestasi di wilayah yang mempersulit aturan, birokrasi dan perizinan. Masih banyak daerah yang memudahkan dalam investasi," kata Fikri. *realat*



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST

Rabu  
12 Februari 2025

# Darurat Sampah, Hikmah bagi Kota Seribu Sungai

**PENUTUPAN** Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 1 Februari 2025 telah menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat. Padahal produksi sampah harian Kota Banjarmasin mencapai 650-700 ton per harinya. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di jalan dan TPS liar.

Penutupan TPA Basirih karena sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar, termasuk praktik open dumping telah berlangsung bertahun-tahun. KLH perlu kita apresiasi dalam penegakkan standar pengelolaan sampah yang berkelanjutan, demi mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang. Darurat sampah di Banjarmasin membawa beberapa hikmah yang dapat menjadi pembelajaran dan pemacu perubahan positif.

Pertama, penutupan TPA Basirih memaksa pemerintah dan masyarakat bertindak lebih serius dalam pengelolaan sampah secara mandiri dari tingkat rumah tangga. Kegiatan pemilahan secara mandiri harus dilakukan masyarakat sejak awal, serta memanfaatkan bank sampah dan pusat daur ulang untuk mengurangi volume sampah residu yang bermuara ke TPA. Kota Banjarmasin telah memiliki 356 bank sampah, namun kinerjanya belum maksimal. Kebiasaan pilah sampah dari sumber tentu menjadi solusi jangka panjang, dengan target 100 persen partisipasi rumah tangga dalam pemilahan.

Kedua, krisis ini menyoroti kelemahan sistem pengelolaan sampah terbuka yang selama ini dijalankan. Pemerintah Kota Banjarmasin harus memacu diri untuk perbaikan berbagai infrastruktur di TPA, seperti drainase, kolam lindi, dan fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern. Perlu adanya solusi jangka panjang dengan pembangunan Tempat Pembiayaan Sampah (TPS) terpadu di tingkat kelurahan dan kecamatan. Harapan besar, pemerintah kota

an di Banjarmasin perlu menjadi bahan pertimbangan untuk memantau volume sampah di TPS secara *real time* dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Ketiga, situasi darurat ini mendorong koordinasi intensif antara Pemerintah Kota, Provinsi, dan Kementerian terkait. Sinergi ini menunjukkan pentingnya kerja sama multilevel governance dalam mengatasi masalah lingkungan. Kemitraan dengan lembaga lain (nasional dan internasional) diperlukan untuk pendanaan dan transfer teknologi sanitasi. Kolaborasi dengan akademisi, aktivis lingkungan, komunitas, dan pelaku usaha/swasta harus diarahkan pada rancangan solusi inklusif.

Pemerintah Kota Banjarmasin harus segera merancang program berkelanjutan dan edukasi yang melibatkan berbagai pihak dalam proyek pengelolaan sampah berbasis komunitas. Komunitas dapat menjadi garda terdepan dalam menginisiasikan pemilahan sampah, termasuk pelatihan tentang kompos tradisional, kompos cacing, bokashi, biogas, eco-enzyme, penggunaan maggot, ecobrick, sampai urban farming dengan sampah organik.

Keempat, pengurangan sampah dari sumber dapat menekan ketergantungan terhadap TPA dan melibatkan masyarakat dalam penciptaan ekonomi sirkuler serta peluang baru, baik melalui pengolahan sampah menjadi kompos, kerajinan daur ulang, produk bernilai tinggi dan energi alternatif lainnya. Kombinasi teknologi, kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat terkait pemanfaatan sampah organik dan anorganik dapat menjadi sumber daya bernilai daripada sekadar limbah.

Kelima, darurat sampah yang terjadi menjadi contoh nyata bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat mulai menyadari bahwa praktik open dumping dapat merusak lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan dan

didikan dalam pengelolaan sampah dan mitigasi bencana akibat kerusakan lingkungan harus terus disampaikan kepada masyarakat, baik melalui program di sekolah, media sosial, atau pelatihan-pelatihan.

Penutupan TPA Basirih menjadi contoh pelanggaran aturan lingkungan yang tidak lagi dapat ditoleransi. Kota lain di seluruh Indonesia juga terpacu dalam perbaikan sistem pengelolaan sampahnya. Mengingat 54 persen TPA di Indonesia masih menggunakan metode serupa. Evaluasi dan inovasi kebijakan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Banjarmasin. Penegakan hukum lingkungan akan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan sampah ilegal. Penerapan sanksi bagi yang tidak mengelola sampah, menjadi salah satu cara dalam penegakan aturan lingkungan.

Prioritas utama adalah mengelola sampah di kota Banjarmasin melalui pendekatan holistik, memadukan infrastruktur, regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan sampah di Banjarmasin harus mengintegrasikan berbagai elemen (masyarakat, akademisi, pihak swasta, komunitas, dan media) serta alokasi anggaran yang proporsional. Semua elemen di Banjarmasin harus menjawab tantangan ini dengan program yang memadukan langkah jangka pendek dan panjang, memanfaatkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor, serta mengintegrasikan inovasi kebijakan. Pelibatan berbagai elemen merupakan langkah strategis dalam mempercepat pengelolaan sampah di kota seribu sungai.

Banjarmasin memerlukan keseimbangan ekologi dan kesejahteraan bersama tanpa mengabaikan tanggung jawab lingkungan. Meskipun penutupan TPA Basirih awalnya menimbulkan krisis, situasi ini menjadi momentum bagi Banjarmasin untuk bertransformasi menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dari peningkatan kesadaran mas-



Oleh:  
**Maulana Khalid**  
Dosen Pendidikan  
FKIP ULIM

Banjarmasin me  
keseimbangan el  
kesejahteraan l  
tanpa menga  
tanggung jawab l  
Meskipun per  
TPA Basirih a  
menimbulkan kr  
ini menjadi mo  
bagi Banjarmasin  
bertransformasi  
pengelolaan san



Universitas  
LAMBUNG MANGKURAT  
*Waja Sampai ka Puting*

**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**RADAR BANJARMASIN**

Kamis  
13 Februari 2025

Universitas Lambung Mangkurat



PRASASTI: Rektor ULM Prof Ahmad bersama Asisten I Sekda Kotabaru, Drs H Minggu Basuki Kotabaru mewakili Bupati Kotabaru H Sayed Jafer Al Idrus merandatkan prasasti.

### Mini Soccer ULM Ramah Banjir

Lapangan Panggung Pertama di Kalsel

BANJARMASIN – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) meresmikan lapangan mini soccer panggung pertama di Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, kompleks Dosen ULM Belimbing Darat, Rabu (12/2).

Rektor ULM, Prof. Ahmad menjelaskan pembangunan lapangan ini menggunakan dana APBN sebesar Rp2 miliar dan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru senilai Rp3 miliar. Dana hibah tersebut diberikan saat rangkaian acara Komnas 2023 dan baru direalisasikan tahun 2024.

Lapangan ini merupakan bagian dari program pengembangan infrastruktur ULM. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya disekitar sini," ujar Prof. Ahmad.

Keuntungan lapangan terletak pada konstruksi panggungnya yang menunjukkan kepedulian teknik sipil ULM terhadap lingkungan lahan basah. "Lapangan ini dijamin tidak akan pernah tergenang air, sehingga aman digunakan saat hujan," jelasnya.

Peresmian dihadiri Asisten I Sekda Kotabaru, Drs H Minggu Basuki yang mewakili Bupati Kotabaru H Sayed Jafer Al Idrus, beserta jajaran Civitas Akademik ULM dan mitra kerja ULM.

Prof. Ahmad menambahkan, meski belum 100 persen rampung dan masih membutuhkan beberapa fasilitas pendukung, lapangan yang akan dikelola badan pengelolaan usaha ULM ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat umum dengan aturan tertentu. (\*/map-13/al/ram)

PERESMIAN: Tendangan bola pertama di Lapangan Mini Soccer SJA ULM oleh Rektor ULM Prof. Ahmad.





## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BARITO POST

Kamis  
13 Februari 2025

4 KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 | Banjarmasin Post

# Tukin Dosen Tak Dibayar Potret Kebijakan Gagal

**KETIDAKJELASAN** mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih berlanjut sampai saat ini dan telah memicu serangkaian demonstrasi di berbagai daerah. Para dosen menuntut pencatatan Tukin yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

Pada 3 Februari 2025 yang lalu, sekitar 300 dosen dari seluruh Indonesia berkumpul di sekitar Monas, Jakarta, untuk menuntut pembayaran Tukin yang tertunda. Mereka menegaskan akan mengawal tuntutan ini hingga Tukin masuk ke rekening masing-masing.

Para dosen akhirnya turun ke jalan. Bahkan, mereka mengancam untuk mogok mengajar karena Tukin mereka selama lima tahun tidak dibayarkan oleh rezim Pak Jokowi. Sementara itu, Presiden Prabowo hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dari total tanggungan yang mencapai Rp 8,2 triliun.

Dilema ini sebenarnya berada di ranah Kementerian Pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi. Kita memahami bahwa ada regulasi yang mengatur, tetapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat pemenuhan kewajiban ini sulit dilakukan.

Menteri Pendidikan Tinggi sebenarnya berada dalam posisi terdesak karena harus mematuhi bahwa para dosen memiliki kebutuhan material dan substansial, yaitu pendapatan yang berbasis pada kinerja mereka. Oleh karena itu, pemenuhan tuntutan ini hanya dapat terjadi jika memang ada anggaran yang tersedia.

Namun, protes yang dilakukan para dosen adalah hak mereka sebagai bagian dari negara. Kebijakan yang mereka kritisi sebenarnya adalah kebijakan presiden sebelumnya, yakni periode 2014-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada masa itu, pemerintah menjanjikan adanya anggaran tambahan yang bukan sekadar insentif, melainkan hak berbasis prestasi kinerja para dosen.

Jika hak itu dibatalkan, maka ini

rikan. Dalam analisis ekonomi politik, ini bisa disebut sebagai pengambilalihan nilai leleh (surplus value) tanpa adanya imbalan yang setimpal.

Presiden Prabowo mungkin bisa berargumentasi bahwa kebijakan tersebut bukanlah tanggung jawabnya. Tetapi sebagai presiden yang baru, ia tetap harus menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Apalagi, dalam kampanyenya, Pak Prabowo menekankan pentingnya pendidikan dan pangan sebagai prioritas utama.

Sangat mengeherankan, respons dari Kementerian Pendidikan Tinggi justru terkesan aneh. Mereka meminta agar para dosen yang berstatus sebagai ASN tidak berlebihan dalam melakukan aksi unjuk rasa karena dianggap mencoreng marwah ASN. Namun, bukankah yang lebih mencoreng marwah adalah ketika hak-hak mereka tidak dipenuhi? Bahkan, ini juga mencoreng nama baik para pejabat dan pemerintahan zaman Pak Jokowi.

Tentu, para dosen memahami kondisi keuangan negara, tetapi mereka juga menginginkan kepastian. Jika pemerintahan sebelumnya bersalah karena tidak memenuhi janji, maka harus ada bentuk pertanggungjawaban yang jelas.

Kesalahan rezim Pak Jokowi seharusnya diberi sanksi terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi dengan para dosen yang menuntut hak normatif mereka. Ini bukan soal kesalahan dalam membaca regulasi, tetapi tentang janji yang pernah diberikan. Mengapa insentif atau tambahan gaji yang berbasis pada prestasi mereka tidak dibayarkan? Mengapa Pak Jokowi lebih memprioritaskan proyek-proyek lain lebih memilih membangun Ibu Kota Negara (IKN) daripada membangun "ibu kota pikiran", yaitu intelektual para dosen dan akademisi?

Kesulitan harus dimulai dari pemikiran. Sejak awal, tidak bersikap adil terhadap dunia pendidikan. Maka, perlu ada pertanggungjawaban terhadap pemerintahan sebelumnya yang telah gagal dan menyebabkan gelombang

menawarkan solusi. Jika memang tidak mampu membayar secara penuh, maka harus ada skema pembayaran bertahap atau cicilan yang jelas.

Dosen-dosen tentu memahami kondisi APBN, yang masih bergantung pada penerimaan pajak dan utang. Mereka pun terbuka untuk negosiasi. Namun, negosiasi ini harus berdasarkan transparansi ke mana uang yang seharusnya mereka terima? Mengapa dana tersebut justru digunakan untuk proyek-proyek lain yang tidak prioritas? Hari demi hari, semakin banyak janji-janji.

Mungkin bukan hanya dosen yang mengalami hal ini. Bagaimana dengan tenaga honorer? Bagaimana dengan para buruh yang juga dijanjikan sesuatu melalui Omnibus Law? Sensus ini menuntut evaluasi struktural. Sayangnya, pemerintahan Pak Jokowi lebih memilih memperpanjang jalan tol daripada memperpanjang jalan pikiran, lebih memilih membangun IKN daripada membangun peradaban akademik.

Fenomena ribuan dosen turun ke jalan adalah sesuatu yang tidak biasa. Ancaman mogok kerja dari para akademisi ini tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus tentang "marwah ASN" tanpa memperhatikan hak-hak dasar mereka.

Demo tanggal 3 Februari 2025 itu adalah pertanda bahwa ada krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Pak Presiden harus mengambil langkah yang cermat dalam menanggapi tuntutan ini. Mungkin akan ada pembalasan lebih lanjut di DPR atau pengalokasian ulang anggaran oleh Menteri Keuangan. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan.

Jika Pak Prabowo ingin menjaga kepercayaan publik, ia perlu menunjukkan komitmen untuk meng evaluasi kebijakan-kebijakan di era pemerintahan sebelumnya. Banyak proyek di masa lalu yang ternyata lebih bersifat penitrasan daripada berorientasi pada kepentingan rakyat. Sayangnya, pemerintahan Pak Jokowi gagal mendasarkan kehidupan bangsa. Kebijakan



OLEH:  
SYAIFULLAH, N  
Dosen FKIP Bahasa In  
Universitas Lambung M

Fenomena ri  
dosen turun ke  
adalah sesuatu  
tidak biasa. An  
mogok kerja  
para akadem  
tidak boleh di  
sepele. Peme  
seharusnya t  
hanya berbica  
tang "marwah  
tanpa mempe  
kan hak-hak



**Universitas**  
**LAMBUNG MANGKURAT**  
*Waja Sampai ka Puting*

**MERDEKA**  
**BELAJAR**

**Kampus**  
**Merdeka**  
INDONESIA JAYA



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**RADAR BANJARMASIN**



Jumat  
19 Februari 2025

# Dosen ULM Tolak Kampus Kelola Tambang

**BANJARMASIN**—Gelombang penolakan muncul dari kalangan akademisi Kalimantan Selatan terhadap rencana pemerintah memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi.

"Kurang relevan jika kampus mengelola tambang. Filosofi kampus adalah pemberdayaan masyarakat, bukan eksploitasi sumber daya alam," tegas Budi Suryadi, akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Rabu (12/2).

Budi menegaskan pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi justru mengaburkan peran kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. "Tambang itu bersifat sementara. Ketika sumber daya habis, apa yang tersisa untuk kampus?"

Pendidikan seharusnya berorientasi pada inovasi jangka panjang, bukan eksploitasi," jelasnya.

Senada, Akbar Rahman, doktor lulusan Saga University Jepang yang juga akademisi ULM, mengingatkan tugas utama perguruan tinggi adalah mengembangkan pendidikan. "Kampus seharusnya berfokus pada pengembangan solusi berkelanjutan. Jika ingin berkontribusi, cukup sediakan lahan untuk penelitian energi terbarukan," ujarnya.

Wacana pemberian WIUPK kepada perguruan tinggi muncul dalam revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sedang dibahas pemerintah dan DPR RI. Pemerintah mengklaim kebijakan ini mendo-



**KAMPUS:** Para akademisi menegaskan filosofi kampus bukan untuk eksploitasi SDA. Kung program Kampus Merdeka sekaligus mendorong pengembangan pendidikan tinggi berbasis sumber daya alam. (dal/al/ram)



**Universitas**  
**LAMBUNG MANGKURAT**  
*Waja Sampai ka Puting*

**MERDEKA**  
**BELAJAR**

**Kampus**  
**Merdeka**  
INDONESIA JAYA



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Jumat  
14 Februari 2025



**DR MUHAMMAD  
PAZRI SH MH**  
Pengamat Hukum ULM

### Kalau Perlu Sanksi Cabut SIM

**MENJALANKAN** sebuah operasi, tentunya perlu diperhatikan beberapa hal, misalnya memberikan sosialisasi yang intens kepada seluruh lapisan masyarakat dan posisi titik rawan kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

Penegakan hukum menggunakan ETLE sangat bagus, karena salah satunya bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan yaitu menghindari penyalahgunaan wewenang dugaan anggota polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan saat melakukan penilangan.

Dan kalau penegakan hukum menggunakan ETLE ini dioptimalkan tentunya juga akan efektif, apalagi ETLE dapat memantau dan mengawasi lalu lintas secara real-time, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan menjadikan penegakan hukum yang transparan.

Kemudian untuk mengurangi potensi kecelakaan, mungkin bisa dilakukan dengan memperketat pembuatan SIM. Termasuk mencabut SIM apabila seseorang berulang kali melakukan pelanggaran lalu lintas dan bahkan membahayakan pengguna jalan lain, sehingga memberikan efek jera dan edukasi kepada masyarakat.

Tidak kalah penting, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Baik melalui pemantauan dan pelaporan pelanggaran seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu juga dengan cara membangun mental tertib berlalu lintas juga menjaga keselamatan pribadi dan pengendara lain. (ran)

**NEWS  
ANALYSIS**



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN

# Metropolis

SENIN 17 FEBRUARI | TAHUN 2025 HALAMAN 9



MAHASISWA Tolak Efisiensi Ugal-ugalan

Mahasiswa khawatir pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi berdampak ke kuota beasiswa dan UKT. Kendati belakangan Menkeu menjamin tidak ada pemotongan, mahasiswa tetap skeptis. Sejak ini (17/2) mahasiswa di Banjarmasin turun ke jalan, menolak efisiensi di sektor pendidikan.

BANJARMASIN - Mahasiswa Kalimantan Selatan khawatir dengan rencana pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) tahun 2025. Menteri Satrio Soemantri mengatakan, efisiensi ini bakal berdampak pada berbagai program beasiswa dan UKT.

Sebelumnya, Kemendiknas telah mengumumkan rencana pemangkasan sebesar Rp2,5 triliun dari total anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp76 triliun.

Menurut Satrio Soemantri, efisiensi ini bakal berdampak pada berbagai program beasiswa dan UKT. Sebelumnya, Kemendiknas telah mengumumkan rencana pemangkasan sebesar Rp2,5 triliun dari total anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp76 triliun.

Menurut Satrio Soemantri, efisiensi ini bakal berdampak pada berbagai program beasiswa dan UKT. Sebelumnya, Kemendiknas telah mengumumkan rencana pemangkasan sebesar Rp2,5 triliun dari total anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp76 triliun.

## Skeptis dengan Jaminan Menkeu

MAHASISWA...  
Sambutan Hari 9

Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) disebut-sebut akan dipotong sebesar Rp1,31 triliun dari pagu Rp14,70 triliun.

Selain itu, beberapa program yang terancam pemangkasan anggaran adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi, menyatakan dana KIP Kuliah tetap akan dipertahankan sebesar Rp14,70 triliun. Mulyani menyatakan, tahun ini 1.040.192 mahasiswa akan tetap mendapat bantuan.

Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) di bawah Kementerian Agama juga dipastikan tetap berjalan.

Demikian pula dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan yang menarget 40.030 penerima.

Kabar lain, terkait Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)-yang berdampak terhadap kenaikan UKT-sebelumnya dilaporkan terkena efisiensi hingga 50 persen atau senilai Rp3.000 triliun dari pagu Rp6,018 triliun, tetap aman dan dapat digunakan.

Akan tetapi, kekhawatiran mahasiswa belum sepenuhnya hilang, karena pemangkasan mungkin terjadi pada pos-pos anggaran lain yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

**Pelajar Ikt Khawatir**  
Kekhawatiran serupa juga dirasakan Siti Maisaroh, mahasiswa ULM lainnya. "Rumor pengurangan beasiswa dan kemungkinan kenaikan uang kuliah benar-benar membuat kami cemas," ujar Maisaroh.

Ditambahkannya, rumor ini tak hanya menciptakan kecemasan di kalangan mahasiswa, tetapi juga mengancam impian pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Saya mendengar cerita dari adik-adik kami yang masih SMA. Mereka mulai panik karena khawatir tidak bisa kuliah," ungkapnya.

Maisaroh adalah penerima manfaat program beasiswa KIP-K. Beasiswa sebesar Rp6,7 juta per semester itu telah menopang studinya.

"Beasiswa ini sangat membantu, terutama untuk menunjang kebutuhan kuliah saya sebagai mahasiswa perantau dari Kotabaru," katanya.

Maisaroh berharap pemerintah benar-benar melindungi keberlanjutan program beasiswa pendidikan tinggi.

**Demo ke Gedung DPRD**  
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Hadi tetap khawatir dengan rencana efisiensi anggaran Kemendiknas tahun 2025.

"Yang dikhawatirkan, efisiensi berpengaruh terhadap kuota penerimaannya di masa mendatang," ujar Hadi, Ahad (16/2).

Hadi skeptis terhadap pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut dana beasiswa dan BOPTN tidak terkena pemotongan.

Menurutnya, kementerian yang mengurus pendidikan seharusnya diceklistrik dari efisiensi anggaran, mengingat pentingnya sektor ini dalam membangun masa depan bangsa.

"Meskipun pemerintah memastikan anggaran untuk program beasiswa tetap utuh, pemangkasan dana operasional pendidikan tetap akan berdampak terhadap akses masyarakat ke pendidikan," ucapnya.

Ia mencontohkan, pemangkasan anggaran operasional akan mengakibatkan demotivasi ASN Kemendiknas. Menurunkan semangat kerja mereka, yang pada akhirnya memengaruhi proses administrasi, termasuk pelayanan beasiswa.

"Kalau motivasi kerja ASN menurun, proses administrasi seperti pencetakan beasiswa yang biasanya cepat dan tepat waktu bisa jadi lambat," tambahnya.

Ia berharap, pemerintah memperhatikan keluhan mahasiswa yang juga turut serta dalam efisiensi di sektor pendidikan.

**Demo ke Gedung DPRD**  
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Hadi tetap khawatir dengan rencana efisiensi anggaran Kemendiknas tahun 2025.

"Yang dikhawatirkan, efisiensi berpengaruh terhadap kuota penerimaannya di masa mendatang," ujar Hadi, Ahad (16/2).

Hadi skeptis terhadap pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut dana beasiswa dan BOPTN tidak terkena pemotongan.

Menurutnya, kementerian yang mengurus pendidikan seharusnya diceklistrik dari efisiensi anggaran, mengingat pentingnya sektor ini dalam membangun masa depan bangsa.

"Meskipun pemerintah memastikan anggaran untuk program beasiswa tetap utuh, pemangkasan dana operasional pendidikan tetap akan berdampak terhadap akses masyarakat ke pendidikan," ucapnya.

Ia mencontohkan, pemangkasan anggaran operasional akan mengakibatkan demotivasi ASN Kemendiknas. Menurunkan semangat kerja mereka, yang pada akhirnya memengaruhi proses administrasi, termasuk pelayanan beasiswa.

"Kalau motivasi kerja ASN menurun, proses administrasi seperti pencetakan beasiswa yang biasanya cepat dan tepat waktu bisa jadi lambat," tambahnya.

Ia berharap, pemerintah memperhatikan keluhan mahasiswa yang juga turut serta dalam efisiensi di sektor pendidikan.

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi, menyatakan dana KIP Kuliah tetap akan dipertahankan sebesar Rp14,70 triliun. Mulyani menyatakan, tahun ini 1.040.192 mahasiswa akan tetap mendapat bantuan.

Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) di bawah Kementerian Agama juga dipastikan tetap berjalan.

Demikian pula dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan yang menarget 40.030 penerima.

Kabar lain, terkait Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)-yang berdampak terhadap kenaikan UKT-sebelumnya dilaporkan terkena efisiensi hingga 50 persen atau senilai Rp3.000 triliun dari pagu Rp6,018 triliun, tetap aman dan dapat digunakan.

Akan tetapi, kekhawatiran mahasiswa belum sepenuhnya hilang, karena pemangkasan mungkin terjadi pada pos-pos anggaran lain yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

**Demotivasi ASN**  
Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Hadi tetap khawatir dengan rencana efisiensi anggaran Kemendiknas tahun 2025.

"Yang dikhawatirkan, efisiensi berpengaruh terhadap kuota penerimaannya di masa mendatang," ujar Hadi, Ahad (16/2).

Hadi skeptis terhadap pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut dana beasiswa dan BOPTN tidak terkena pemotongan.

Menurutnya, kementerian yang mengurus pendidikan seharusnya diceklistrik dari efisiensi anggaran, mengingat pentingnya sektor ini dalam membangun masa depan bangsa.

"Meskipun pemerintah memastikan anggaran untuk program beasiswa tetap utuh, pemangkasan dana operasional pendidikan tetap akan berdampak terhadap akses masyarakat ke pendidikan," ucapnya.

Ia mencontohkan, pemangkasan anggaran operasional akan mengakibatkan demotivasi ASN Kemendiknas. Menurunkan semangat kerja mereka, yang pada akhirnya memengaruhi proses administrasi, termasuk pelayanan beasiswa.

"Kalau motivasi kerja ASN menurun, proses administrasi seperti pencetakan beasiswa yang biasanya cepat dan tepat waktu bisa jadi lambat," tambahnya.

Ia berharap, pemerintah memperhatikan keluhan mahasiswa yang juga turut serta dalam efisiensi di sektor pendidikan.

**Pelajar Ikt Khawatir**  
Kekhawatiran serupa juga dirasakan Siti Maisaroh, mahasiswa ULM lainnya. "Rumor pengurangan beasiswa dan kemungkinan kenaikan uang kuliah benar-benar membuat kami cemas," ujar Maisaroh.

Ditambahkannya, rumor ini tak hanya menciptakan kecemasan di kalangan mahasiswa, tetapi juga mengancam impian pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Saya mendengar cerita dari adik-adik kami yang masih SMA. Mereka mulai panik karena khawatir tidak bisa kuliah," ungkapnya.

Maisaroh adalah penerima manfaat program beasiswa KIP-K. Beasiswa sebesar Rp6,7 juta per semester itu telah menopang studinya.

"Beasiswa ini sangat membantu, terutama untuk menunjang kebutuhan kuliah saya sebagai mahasiswa perantau dari Kotabaru," katanya.

Maisaroh berharap pemerintah benar-benar melindungi keberlanjutan program beasiswa pendidikan tinggi.

**Demo ke Gedung DPRD**  
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Hadi tetap khawatir dengan rencana efisiensi anggaran Kemendiknas tahun 2025.

"Yang dikhawatirkan, efisiensi berpengaruh terhadap kuota penerimaannya di masa mendatang," ujar Hadi, Ahad (16/2).

Hadi skeptis terhadap pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut dana beasiswa dan BOPTN tidak terkena pemotongan.

Menurutnya, kementerian yang mengurus pendidikan seharusnya diceklistrik dari efisiensi anggaran, mengingat pentingnya sektor ini dalam membangun masa depan bangsa.

"Meskipun pemerintah memastikan anggaran untuk program beasiswa tetap utuh, pemangkasan dana operasional pendidikan tetap akan berdampak terhadap akses masyarakat ke pendidikan," ucapnya.

Ia mencontohkan, pemangkasan anggaran operasional akan mengakibatkan demotivasi ASN Kemendiknas. Menurunkan semangat kerja mereka, yang pada akhirnya memengaruhi proses administrasi, termasuk pelayanan beasiswa.

"Kalau motivasi kerja ASN menurun, proses administrasi seperti pencetakan beasiswa yang biasanya cepat dan tepat waktu bisa jadi lambat," tambahnya.

Ia berharap, pemerintah memperhatikan keluhan mahasiswa yang juga turut serta dalam efisiensi di sektor pendidikan.



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN

# Opini

SENIN 17 FEBRUARI TAHUN 2025 | HALAMAN 6

## Potensi Kertas Nanosilver sebagai Detektor Ion Merkuri: Inovasi untuk Lingkungan yang Lebih Aman

**PENCEMARAN** merkuri merupakan masalah global yang secara serius mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Merkuri adalah logam berat berbahaya yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan, seperti air, tanah, dan udara. Paparan merkuri dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari kerusakan saraf hingga gangguan perkembangan pada anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki metode yang efektif dan efisien untuk mendeteksi keberadaan merkuri.

Salah satu inovasi menjanjikan dalam deteksi merkuri adalah penggunaan kertas nanosilver. Kertas nanosilver adalah bahan yang terbuat dari

alat sederhana. Perubahan warna ini bisa bervariasi, tetapi umumnya mengarah pada warna yang lebih gelap atau lebih transparan. Perubahan warna inilah yang menjadi dasar dari penggunaan kertas nanosilver sebagai detektor ion merkuri.

**Keunggulan Kertas Nanosilver sebagai Detektor Ion Merkuri**

Kertas nanosilver memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi kandidat ideal untuk deteksi ion merkuri:

- **Sensitivitas Tinggi:** Kertas nanosilver dapat mendeteksi ion merkuri pada konsentrasi yang sangat rendah. Hal ini memungkinkan deteksi merkuri pada tahap awal pencemaran, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat.
- **Selektivitas Tinggi:** Kertas nanosilver dirancang untuk bereaksi secara khusus dengan ion merkuri, meminimalkan gangguan dari zat lain yang mungkin hadir dalam sampel.
- **Mudah Digunakan:** Penggunaan

silver adalah bahan yang terbuat dari solusi dengan lapisan nanopartikel perak. Nanopartikel perak memiliki sifat unik yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan ion merkuri. Ketika ion merkuri hadir, nanopartikel perak akan mengalami perubahan warna yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dideteksi dengan per-

silver dapat digunakan untuk menguji keberadaan merkuri dalam produk makanan, seperti ikan dan makanan laut.

- **Kesehatan Masyarakat:** Kertas nanosilver dapat digunakan untuk menguji keberadaan merkuri dalam sampel biologis, seperti darah dan urin, untuk mendeteksi paparan merkuri pada manusia.

**Tantangan dan Pengembangan**

Meskipun memiliki potensi besar pengembangan kertas nanosilver sebagai detektor ion merkuri juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah stabilitas nanopartikel perak dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan stabilitas kertas nanosilver dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, perlu mengembangkan metode deteksi yang lebih kuantitatif menggunakan kertas nanosilver. Saat ini, deteksi merkuri dengan kertas nanosilver sebagian besar bersifat kualitatif, yaitu hanya menunjukkan

**Lebih Lanjut**

Meskipun memiliki potensi besar pengembangan kertas nanosilver sebagai detektor ion merkuri juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah stabilitas nanopartikel perak dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan stabilitas kertas nanosilver dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, perlu mengembangkan metode deteksi yang lebih kuantitatif menggunakan kertas nanosilver. Saat ini, deteksi merkuri dengan kertas nanosilver sebagian besar bersifat kualitatif, yaitu hanya menunjukkan

Oleh  
**IBRAHIM DAN UMI BAROROH LILI UTAMI<sup>\*)</sup>**

<sup>\*)</sup> Magister Kimia, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**



Senin  
17 Februari 2025



### Mudah...

● Sambungan Hal 5

"Hingga akhirnya saya tertantang, untuk terus berada di lingkungan yang positif ini," kata remaja berusia 22 tahun ini.

Terlahir dari keluarga sederhana dan hasil didikan kedua orangtuanya, membuat Imay tumbuh dengan jiwa suka menolong.

Maka tidak heran gadis cantik asal Kotabaru ini sangat gemar membantu.

Imay merasa mudah berempati.

"Keikhlasan hati untuk menolong sesama, sudah menjadi tujuan utama saya dalam hidup," ucapnya. (mel/\*)

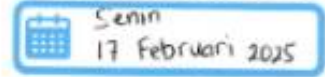


## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**



## Mahasiswa Bakal Aksi di Depan Gedung Dewan

● Kritisi Kebijakan Presiden Pangkas Anggaran

**BANJARMASIN, BPOST** - Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menggelar aksi untuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (17/2) siang.

Aksi ini menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai merugikan masyarakat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

(BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ady Jayadi, mengonfirmasi rencana aksi ini.

Ia menegaskan, mahasiswa menolak instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran.

"Kami meminta pemerintah, khususnya Presiden, untuk meninjau ulang kebijak-

● Hal 11 kol 1-3

### Mahasiswa...

● Sambutan Hal 5

an pemangkasan anggaran ini karena dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat," ujar Ady, Minggu (16/2).

Selain menolak pemangkasan anggaran, demonstran juga akan menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada

kampus.

Lalu, menuntut percepatan pencatatan tunjangan kinerja (tukin) dosen, serta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu kesehatan juga menjadi perhatian dalam aksi ini.

Gelombang protes ini tidak hanya terjadi di Kalsel.

Dari pantauan media sosial, seruan serupa juga digaungkan oleh organisasi mahasiswa di berbagai daerah, seperti BEM Universitas

Indonesia (UI), BEM Universitas Airlangga (Unair), dan BEM Seluruh Indonesia (SI), yang turut menyerukan aksi serentak menolak kebijakan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan, pemangkasan anggaran ini bertujuan menghemat hingga Rp 306,69 triliun pada 2025. Sebagian dari dana tersebut, sekitar Rp 24 triliun, akan dialokasikan untuk program MBG. (msr)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Senin  
17 Februari 2025

## Anak Muda Tabalong Dapat Beasiswa Pemerintah Amerika

**TANJUNG, BPOST** - Seorang anak muda asal Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Diva Oktavina Ifada (23) meraih beasiswa program Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Spring 2025 dari pemerintah Amerika Serikat.

Selama lima pekan sejak April-Mei 2025, alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalsel ini bakal mengikuti program khusus dari pemerintah AS berupa pelatihan keterampilan bidang kewirausahaan dan pemerintahan.

"Berkat keyakinan, akhirnya saya bisa lulus seleksi YSEALI yang sangat ketat dan rencana program beasiswa dimulai April 2025," ucap Diva di Tabalong, Minggu (16/2).

Sebelumnya Diva sempat merasa pesimistis. Tapi keyakinan pada diri sendiri menjadi kunci untuk meraih

kesuksesan.

Impian untuk belajar di luar negeri melalui beasiswa tersebut menjadi motivasi bagi Diva yang punya banyak prestasi pada lomba debat bahasa Inggris sejak usia dini.

"Mimpi untuk belajar dan mengembangkan diri di luar negeri bukan hal mustahil karena itu saya berharap dapat terus menginspirasi anak daerah dan generasi muda di Indonesia untuk terus berusaha meraih mimpi mereka," ungkapnya.

Namun, seperti halnya perjalanan menuju kesuksesan, tidak semua usaha menghasilkan hasil yang diharapkan.



**DIVA OKTAVINA  
IFADA**

Pada 2023, keinginan Diva untuk mendapat beasiswa ke luar negeri kandas setelah mendapat penolakan mengikuti program sebuah program beasiswa bergengsi yang diselenggarakan Kemendikbudristek, yakni Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).

Penolakan ini menjadi pukulan berat, namun Diva tidak menyerah dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai momentum untuk belajar dan berkembang.

Hal itu, diungkapkan Diva, justru menjadikan kegagalan sebagai katalis menjadi lebih kuat dan lebih berani untuk mengejar mimpi. (antara)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
18 Februari 2025



### Aksi Indonesia Gelap

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI melakukan aksi bertajuk 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (17/2). Dalam aksinya, mahasiswa membawa lima tuntutan yaitu mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut efisiensi anggaran, transparansi status pembangunan, transparansi keseluruhan program MBG, tolak revisi UU Minerba, tolak dwifungsi TNI, tangkap dan adili Jokowi, dan sahkan RUU Perampasan AseL.

## Mahasiswa dan Polisi Sempat Bersitegang

● Gelar Aksi Penolakan Pemangkasan Anggaran di Hadapan Dewan

**BANJARMASIN, BPOST**  
Lebih dari 100 mahasiswa dan masyarakat sipil meng gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Selasa (17/2).

Mereka menolak kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang dinilai telah merugikan lembaga rakyat, terutama di sektor pendidikan.

Demonstrasi membawa berbagai spanduk berisi tuntutan terhadap kebijakan

tersebut. Dehertan di antaranya bertajuk 'Pegawai Kerti Dikurungin, Pegawai Besar Dibayarkan' dan 'Pemerintah Pecus Kari Seta-Hip-Ham'.

Dalam utasannya, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ady Jayadi, menyimpulkan ketidakadilan terhadap dampak pemangkasan anggaran.

"Kita tidak ingin hidup di PHK. Itu apa artinya?"

● **18/2 kalsel**



**TEMUI DEMONSTRAN** Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dhuha Zain dan Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Purnomo menemui demonstran aksi unjuk rasa menolak pemangkasan anggaran, pada Senin (17/2).

### Mahasiswa...

● **SembangKalsel**

lokasinya tidak bisa melakukan aksi, dan adanya biaya bus untuk gratis," katanya di hadapan para demonstran.

Mereka juga menyeru narasi 'Indonesia Emas 2045' yang sering digunakan pemerintah. Menurut mereka, visi tersebut hanya untuk menggoda jika sektor pendidikan tidak menjadi prioritas.

"Indonesia yang katanya emas, kini menjadi Indonesia emas," sambut Ady di tepi sungai.

Aksi unjuk rasa ini tidak hanya menyuarakan penolakan anggaran secara umum. Demonstrasi yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil juga membawa sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah.

Ketegaan antara demonstrasi dan aparat kepolisian sempat memanas akibat

tidak sempat memurnikan aksi damai.

Insiden ini dipicu oleh seorang demonstran yang hendak membuka bus di ruas Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Namun, sebelum aksi itu terjadi, aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi bus dan busan bus yang hendak digunakan.

Hal ini memicu ketegangan antara demonstran dan aparat, yang berujung pada aksi unjuk rasa dengan mendongor antara beberapa peserta aksi dan petugas keamanan.

Beberapa demonstran tampak berwujud merobek bus yang telah diamankan, sementara aparat dengan sigap membentak bus untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kepala Bagian Operasi Kabag, Opri Perdana Banjarmasin, Kompol I Made Subagyo Widyasamudra,

indikasi yang hendak merobek bus bukan berasal dari kalangan mahasiswa.

"Mereka bukan mahasiswa, tetapi bukan mahasiswa yang hendak berunjuk rasa. Kami sudah melakukan survey secara langsung untuk menjaga ketertarikan," ujarnya.

Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ady Jayadi menegaskan, aksi ini bukan sekadar penolakan, tetapi juga menuntut agar pemerintah meninjau ulang kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Antara lain demonstrasi menuntut adanya kejelasan dalam proses rekonstruksi anggaran agar pemangkasan tidak merugikan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Massa aksi juga menuntut pemerintah membatalkan tolak pengajuan Mekanisme Gula (MGO) bea-

serat tepat sasaran dan tidak mengganggu sektor lain yang telah terdampak.

Selain itu, mereka menuntut kebijakan pengurangan belanja, termasuk program Riset Indonesia Pintar (RIP) Kuliah, yang dapat berdampak langsung pada akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Anggota Komisi I DPRD Kalsel dan Ketua Gerakan Rakyat (GRS), Dhuha Zain menyatakan, pihaknya akan mengawasi secara ketat aksi yang telah diumumkan oleh para demonstran.

Dihum, menambahkan, pada Rabu (18/2), akan ada rapat yang melibatkan pimpinan DPRD seluruh Indonesia di Gedung DPRD DKI Jakarta, yang juga akan membahas masalah serupa.

"Kami akan menyampaikan tuntutan mahasiswa pada rapat tersebut," jelasnya. (mar/ras)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
18 Februari 2025

## Harus Optimistis Lahirkan Pengajar Hebat

**KONDISI** anggaran yang mengalami efisiensi sangat tidak memungkinkan memfasilitasi semua guru untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Jika hanya 50 persen kurang lebih yang harus disertakan di PPG, maka itulah kemampuan negara yang hari ini bisa dilakukan. Terlepas dari hal tersebut, optimisme melahirkan guru atau pengajar hebat harus dimunculkan.

Apakah dengan 50 persen yang dimungkinkan mengikuti PPG 2025 ini akan melahirkan pencapaian guru bermutu terhambat? Ada dua jawaban yang bisa dimunculkan.

Pertama, bisa terjadi selama kementerian tidak membuat program inovatif dan inisa-

NEWS  
ANALYSIS



**Moh Yamin**  
Pememati Pendidikan  
ULM

tif untuk mengakselerasi SDM unggul. Mungkin PPG sementara tidak bisa dilaksanakan total, mengingat anggaran belum maksimal. Ini menjadi tantangan tersendiri.

Kedua, tidak terhambat selama ada program kebijakan pendamping sebelum PPG jilid selanjutnya. Barangkali sertifikat pendidik untuk 50 persen guru belum terfasilitasi, namun mereka mendapat bekal pelatihan tertentu sehingga kegiatan ini memperkaya penguatan kapasitas guru profesional.

Saat PPG lanjutan dimulai, mereka cukup melengkapi kekurangan administrasi. Seperti apa konsep

● Hal 11 kol 1-3

### Harus Optimistis...

● Sambungan Hal 9

yang akan dilakukan, kementerian terkait perlu merumuskan formula yang relevan.

Semoga efisiensi anggaran memberi energi baru bagi

penguatan SDM unggul dan semakin selektif membuat program kebijakan yang berdampak bagi peradaban. (sul)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa



### Kecam Pemerintah

Mahasiswa dan masyarakat sipil membentangkan sejumlah spanduk kecaman kepada pemerintah saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (17/2). **Berita halaman 9.**

 Selasa  
18 Februari 2025

\_\_\_\_\_



Universitas  
LAMBUNG MANGKURAT  
*Waja Sampai ka Puting*

**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa





## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

### Demo 'Indonesia Gelap'...

(17/2/2025) siang.

Mereka menolak kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama di sektor pendidikan.

Sejumlah apudak dan poster berisi kecaman terhadap kebijakan tersebut, di antaranya bertuliskan "Waspada, Indonesia Gelap 2025, Darurat Pendidikan, Tutwuri Efasiani", "1 Presiden 1.000 Masalah", "Pegawai Kecil Dikurangi, Pegawai Besar Dibayarkan", dan "Pemerintah Perkosa Kami Setiap Hari".

Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ady Jayadi menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak pemangkasan anggaran.

"Kita tidak ingin bapak-bapak di-PHK, ibunya antri gas, kakaknya tidak bisa melanjutkan kuliah, dan adiknya hanya bisa makan gratis," serunya di hadapan para demonstran.

Mereka juga menyuarakan narasi "Indonesia Emas 2045" yang sering digaungkan pemerintah. Menurut mahasiswa, visi tersebut hanya omong kosong jika sektor pendidikan tidak menjadi prioritas.

"Indonesia yang katanya emas, kini menjadi Indonesia cemas," tambah Ady dalam orasinya.

Para mahasiswa menuntut adanya kejelasan dalam proses rekonstruksi anggaran agar pemangkasan tidak merugikan sektor vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan pemangkasan anggaran yang bertujuan menghemat hingga Rp 306,69 triliun pada 2025.

Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemangkasan ini berdampak pada semua kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung tidak hanya menyuarakan pemangkasan anggaran. Ady Jayadi menegaskan, aksi ini bukan sekadar penolakan, tetapi juga dorongan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Massa aksi juga meminta

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat juga mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan sebagai langkah tegas dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka dari ancaman eksploitasi dan perampasan tanah.

Massa aksi mengucap pengurangan anggaran Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPIN) dan Biaya Penyelenggaraan Pergerakan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPINBH) sebesar 50 persen, yang dinilai dapat menghambat operasional dan riset di perguruan tinggi.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang dianggap tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas dan lebih mengutamakan kepentingan korporasi.

Selain itu, demonstran pun menolak RUU Minerba yang membolehkan pengurangan tinggi mengelola tambang.

Dalam aksi, demonstran diantarkan perwakilan anggota DPRD Kalsel. Para wakil rakyat ini berjanji akan menyampaikan tuntutan aspirasi ke pemerintah pusat.

Sementara itu, di Jakarta ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan tajuk "Indonesia Gelap" di area Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Pantauan di lapangan, sekitar pukul empat sore, ribuan mahasiswa baik dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, UPN Veteran Jakarta, dan kampus lainnya berkumpul di area Monas, depan Perpustakaan Nasional. Mereka berjalan beriringan menuju Patung Kuda sambil berteriak, "Hidup mahasiswa!", "Cabut kebijakan efisiensi anggaran!", "Cabut kebijakan efisiensi anggaran!".

Ketua Kabinet KM ITB, Fidelia Marwa Huwaida, mengatakan aksi ini menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran dan menyeluruh terhadap seluruh kebijakan. Di antaranya, kata dia, menstabilkan kondisi sosial, dan membatalkan kebijakan serta program yang tidak produktif serta tidak berpihak kepada rakyat.

Beberapa kebijakan yang perlu dikaji ulang, kata dia,

### Sambungan hal 1

pihaknya memang menginstruksikan kepada BEM seluruh perguruan tinggi di Indonesia, terkait keprihatinan atas berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini semakin tidak jelas.

"Hari ini kami menginstruksikan buat turun secepat di setiap daerah," katanya, yang dilansir [cnindonesia.com](http://cnindonesia.com), Senin (17/2/2025).

Mengenai tema "Indonesia Gelap" yang digaungkan dalam aksi demo ini, menurut Herianto, untuk mengkritik ragam kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak jelas.

"Secara umum, 'Indonesia Gelap' kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijadikan gelap tanpa ada terangnya," katanya.

Tema ini, imbuh dia, juga sekaligus sebagai sindiran kepada Presiden Prabowo yang kerap mengembangkannya Indonesia Emas 2045.

"Ini sindiran keras bagaimana mungkin mau Indonesia emas, sedangkan kebijakan yang dihadirkan tidak berpihak ke generasi muda yang menjadi pelopor emasnya. Contohnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang belum memadai," ujar dia.

Herianto menyebut ada sejumlah tuntutan yang diusung dalam aksi demo ini. Antara lain, menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang mengancam efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kebijakan yang bertujuan menghemat anggaran ini pada penerapannya justru merugikan rakyat.

Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin memperburuk kondisi rakyat. "Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugat-ugutan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI.

BEM UI pun mendesak Presiden Prabowo segera mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang mengancam anggaran dengan tidak berpihak

Mangkurat (ULM), Ady Jayadi menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak pemangkasan anggaran.

"Kita tidak ingin bapak-bapak di-PHK, ibunya antri gas, kakaknya tidak bisa melanjutkan kuliah, dan adiknya hanya bisa makan gratis," serunya di hadapan para demonstran.

Mereka juga menyuarakan narasi "Indonesia Emas 2045" yang sering digaungkan pemerintah. Menurut mahasiswa, visi tersebut hanya omong kosong jika sektor pendidikan tidak menjadi prioritas.

"Indonesia yang katanya emas, kini menjadi Indonesia cemas," tambah Ady dalam orasinya.

Para mahasiswa menuntut adanya kejelasan dalam proses rekonstruksi anggaran agar pemangkasan tidak merugikan sektor vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan pemangkasan anggaran yang bertujuan menghemat hingga Rp 306,69 triliun pada 2025.

Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemangkasan ini berdampak pada semua kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung tidak hanya menyuarakan pemangkasan anggaran. Ady Jayadi menegaskan, aksi ini bukan sekadar penolakan, tetapi juga dorongan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Massa aksi juga meminta pemerintah memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar tepat sasaran dan tidak mengorbankan sektor lain yang lebih mendesak.

Selain itu, mereka menolak kebijakan pengurangan beasiswa, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang dapat berdampak langsung pada akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Pemangkasan anggaran kesehatan, seperti BPJS dan subsidi kesehatan, juga menjadi perhatian utama, karena dinilai dapat memperburuk akses layanan bagi masyarakat kecil.

persen, yang dinilai dapat menghambat operasional dan riset di perguruan tinggi.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang dianggap tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas dan lebih mengutamakan kepentingan korporasi.

Selain itu, demonstran pun menolak RUU Minerba yang membolehkan pengurangan tinggi mengelola tambang.

Dalam aksi, demonstran diantarkan perwakilan anggota DPRD Kalsel. Para wakil rakyat ini berjanji akan menyampaikan tuntutan aspirasi ke pemerintah pusat.

Sementara itu, di Jakarta ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan tajuk "Indonesia Gelap" di area Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Pantauan di lapangan, sekitar pukul empat sore, ribuan mahasiswa baik dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, UPN Veteran Jakarta, dan kampus lainnya berkumpul di area Monas, depan Perpustakaan Nasional. Mereka berjalan beriringan menuju Patung Kuda sambil berteriak, "Hidup mahasiswa!", "Cabut kebijakan efisiensi anggaran!", "Cabut kebijakan efisiensi anggaran!".

Ketua Kabinet KM ITB, Fidelia Marwa Huwaida, mengatakan aksi ini menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran dan menyeluruh terhadap seluruh kebijakan. Di antaranya, kata dia, menstabilkan kondisi sosial, dan membatalkan kebijakan serta program yang tidak produktif serta tidak berpihak kepada rakyat.

Beberapa kebijakan yang perlu dikaji ulang, kata dia, berupa memastikan pemotongan anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial, mengevaluasi kembali pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi, serta menyelesaikan sengketa lahan yang sedang atau berpotensi terjadi.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meninjau ulang rencana implementasi kebijakan agar tidak merugikan masyarakat maupun memicu ketidakstabilan sosial.

"Pemerintah akhir-akhir ini semakin serampangan dalam membuat kebijakan," kata dia.

Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan,

"Indonesia Gelap" kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijadikan gelap tanpa ada terangnya," katanya.

Tema ini, imbuh dia, juga sekaligus sebagai sindiran kepada Presiden Prabowo yang kerap mengembangkannya Indonesia Emas 2045.

"Ini sindiran keras bagaimana mungkin mau Indonesia emas, sedangkan kebijakan yang dihadirkan tidak berpihak ke generasi muda yang menjadi pelopor emasnya. Contohnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang belum memadai," ujar dia.

Herianto menyebut ada sejumlah tuntutan yang diusung dalam aksi demo ini. Antara lain, menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang mengancam efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kebijakan yang bertujuan menghemat anggaran ini pada penerapannya justru merugikan rakyat.

Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin memperburuk kondisi rakyat. "Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugat-ugutan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI.

BEM UI pun mendesak Presiden Prabowo segera mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang mengancam anggaran dengan tidak berpihak pada rakyat.

Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya.

Aksi mahasiswa bertema "Indonesia Gelap", kemarin, juga berlangsung di Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Aceh, Bali, dan kota-kota lainnya. Mereka menyampaikan tuntutan mereka di kantor pemerintahan dan DPRD masing-masing daerah. [inntrb/net](https://t.me/inntrb/net)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**RADAR BANJARMASIN**

Rabu  
19 Februari 2025

# Hakulyakin Akreditasi Kembali Unggul

- Tim Asesmen BAN-PT Kunjungi ULM
- Second Opinion Positif dari UNS dan Unhas

**BANJARMASIN** – Dalam waktu dekat, perbaikan akreditasi yang ditempuh Universitas Lambung Mangkurat (ULM) akan dinilai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tim asesmen sudah menjadwalkan kedatangan ke Banjarmasin.

Wakil Rektor ULM Bidang Akademik, Iwan Alfanie mengungkapkan, para asesor akan datang ke ULM pada pekan depan. Mereka akan menilai selama tiga hari.

► Baca  
*Hakulyakin...*  
Hal 5



## ■ HAKULYAKIN...

Sambungan Hal 1

"Tim asesmen lapangan datang pada 27 Februari. Rencananya penilaian berlangsung sampai 1 Maret," terangnya. Selasa (18/2). Pihaknya optimistis status

akreditasi ULM akan kembali unggul, setelah turun menjadi baik pada akhir tahun 2024 lalu. "Proses reakreditasi sudah kami lakukan maksimal. Kami optimistis akreditasi ULM akan kembali ke peringkat unggul," yakinnya.

Untuk mempercepat pemulihan

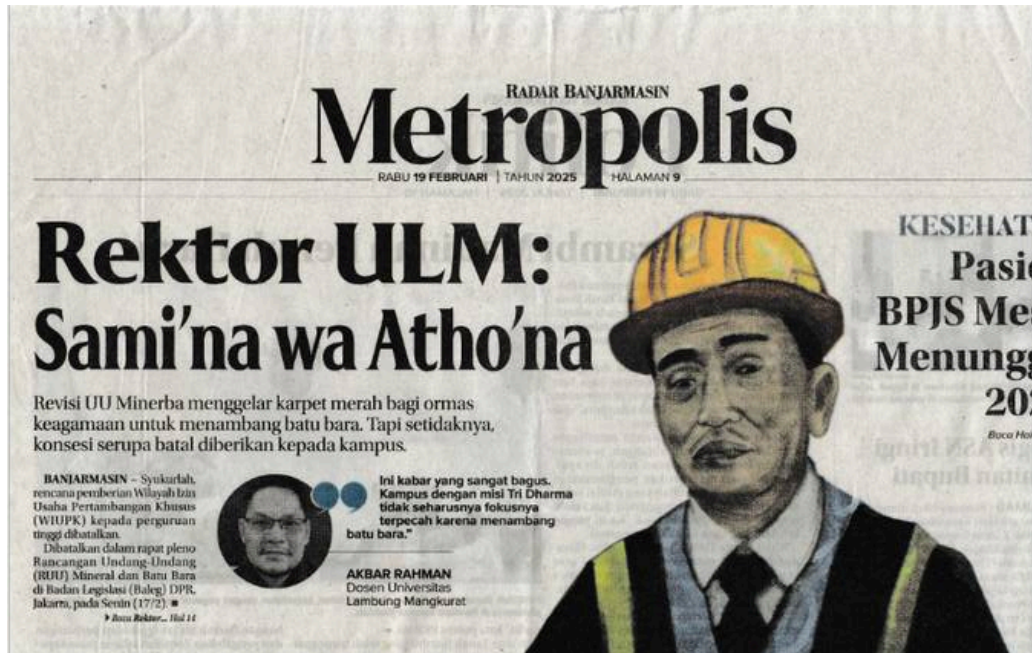
akreditasi ini, ULM membentuk Tim Percepatan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Sebagai ketua ditunjuk Iwan sendiri. Dalam proses reakreditasi, pihaknya telah mengajukan dokumen setebal 300 halaman lebih pada 15 November 2024.



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa





## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**RADAR BANJARMASIN**

Febu  
19 Februari 2025

## Dokumen Setebal 300 Halaman



**METROPOLIS**  
**Rektor ULM:**  
**Sami'na wa**  
**Atho'na**

Baca Halaman 9

Oleh BAN-PT, ULM diberikan batas waktu pengajuan perbaikan akreditasi hingga 19 November 2024 lalu. "Sudah kami kirimkan semua dokumennya sebelum batas waktu 19 November, yakni pada 15 November. Ada 300 lembar halaman lebih yang kami kirimkan secara online dan sudah submit," terang Iwan.

Lalu kapan hasil asesmennya keluar? Iwan belum bisa memastikan. Sebab, setelah tim BAN-PT datang ke ULM, hasil

temuan asesmen tersebut akan disampaikan kepada Majelis Akreditasi. Setelah majelis bersidang, baru hasilnya keluar.

"Insyaallah ketika sudah ada asesmen dan majelis sudah bersidang, akreditasi ULM akan keluar. Kami optimistis akan kembali unggul," imbuhnya.

Keoptimisan serupa disampaikan Ketua Senat ULM, Prof Hadin Muhjad. Menurutnya, proses perbaikan yang dilakukan Tim Percepatan AIPT sudah

maksimal. Belum lagi second opinion atau pendapat kedua pihak eksternal yang menyatakan bagus.

Pendapat lain itu datang dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta dan Universitas Hasanuddin, Makassar. "Dua second opinion dari universitas tersebut hasilnya mencukupi, bahkan melebihi penilaian borang. Kami optimistis akreditasi ULM akan kembali unggul," ujarnya. (mol/gr/mol)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**RADAR BANJARMASIN**

Kamis  
20 Februari 2025

Universitas Lambung Mangkurat



MOMEN: Rektor dan Civitas Akademika ULM bersama Dewas dan Perwakilan dari Pemerintah Kalsel dan Kabupaten/Kota.

## ULM Menuju World Class University's

Kini Duduki Peringkat 3 se-Indonesia Timur dan Tengah

**BANJARBARU** - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) semakin mantap melangkah menuju perguruan tinggi berkelas dunia. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja dan Tinjauan Manajemen Tahun 2025 yang digelar di Hotel Novotel Banjarbaru, Rabu (19/2).

Kegiatan ini fokus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam pencapaian target kinerja menuju ULM berkelas dunia. Berdasarkan data SINTA, ULM kini menduduki peringkat ketiga se-Indonesia Timur dan Tengah serta peringkat 24 nasional. Prestasi ini diperkuat dengan posisi ke-8 nasional dalam Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan peringkat ke-11 dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"Tahun 2025 merupakan tahun ketiga ULM sebagai PTN BLU. Kita harus melakukan refleksi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan, terutama dalam optimalisasi aset dan pengelolaan unit bisnis sebagai sumber PNBIP," tegas Rektor ULM, Prof Dr H Ahmad Alim Bachri SE MSL.

Keseriusan ULM mengejar target tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan beberapa program studi meraih akreditasi unggul, seperti Prodi Psikologi dan Sosial Ekonomi Perikanan. "Diharapkan, program studi lain yang akan menjalani akreditasi ke depan juga dapat meraih hasil serupa," ucap Rektor.

Rektor menambahkan, rapat kerja ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam menjalin sinergi untuk memantapkan capaian di masa mendatang. Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya, kendala yang dihadapi, serta perumusan langkah-langkah strategis untuk tahun 2025 menjadi bagian penting dalam pembahasan.

Dalam mendukung fasilitas kampus, ULM telah meresmikan Mini Soccer dan akan segera meresmikan lapangan atletik pada tahun 2025. Pengembangan fasilitas ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kampus berkelas dunia.

Rapat yang dihadiri 220 peserta ini, termasuk Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat ULM, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, serta berbagai pejabat struktural lainnya, akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAGL) untuk revisi kegiatan tahun berjalan dan perencanaan tahun 2026. (\*/dyt/al/ram)

### RAPAT KERJA DAN TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2025



SAMBUTAN: Rektor ULM, Prof Dr H Ahmad Alim Bachri SE MSL



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BARITO POST**

Kamis  
20 Februari 2025



**RAKER ULM** - Rapat Kerja dan Tinjauan Manajemen Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025 yang dibuka Rektor, Rabu (19/2).

## Rektor: Menuju Universitas Kelas Dunia

● Buka Rapat Kerja dan Tinjauan Manajemen ULM Tahun 2025

**DANJARBARU, BPOST** Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melaksanakan Rapat Kerja bertempat di Novotel Banjarbaru, Rabu (19/2).

Rapat Kerja dan Tinjauan Manajemen ULM tahun 2025 ini mengusung tema "Tingkatkan Koordinasi, Kolaborasi dan Sinergitas Dalam Upaya Pencapaian Target Kinerja Untuk Mewujudkan ULM Sebagai Perguruan Tinggi Kelas Dunia".

Raher dan Tinjauan Manajemen ULM tahun 2025 yang dibuka langsung Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si, ini dilaksanakan dalam rangka menyusun program kerja, guna mendukung capaian visi misi ULM.

Dijelaskan Rektor ULM, Prof. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si bahwa rapat kerja ini merupakan program rutin yang sangat strategis, untuk menentukan masa depan ULM, terutama pada implementasi kinerja tahun 2025 ini.

"Kegiatan ini merupakan satu upaya penting dalam rangka mengentaskan ULM menjadi universitas yang mendunia," ujarnya.

Pada presentasinya disampaikan capaian kinerja 2024, dan target kinerja tahun 2025-2026.

Prof. Ahmad menambahkan raher sebagai upaya penguatan secara in bentuk untuk merencanakan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan anggaran agar bisa menjadi lebih



BANJARBARU POST/UTANDALAH KENYA

efektif dan efisien.

"Sebagai universitas terkemuka, Akreditasi kinerja 2025 ini berdasarkan target, capaian IKU ULM bisa masuk 10 besar lagi. Ini tentu suatu capaian luar biasa," jelasnya.

Ia mengatakan banyak program strategis yang memang perlu diwujudkan untuk mencapai Universitas Kelas Dunia, di antaranya menjalin kolaborasi internasional, reputasi alumni, reputasi publikasi dan reputasi riset internasional.

Sebagai informasi, Rapat kerja ULM 2025 ini diikuti sebanyak 320 peserta, meliputi Ketua dan Sekretaris Senat ULM, Semua Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil, Semua Direktur Pusat Sarjana, Kepala dan Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Koordinator Pro-

di Diploma/S1/S2/S3, Kepala UPA, Sekretaris Dewas, Ketua dan Sekretaris SPL.

Selanjutnya hadir pimpinan Koordinator Banjarbaru, Kabag Umum dan Kabag Akademik Rektorat, Koordinator Rektorat ULM, Kabag Umum Fakultas, Kadubag Umum Lembaga dan Pascasarjana, pimpinan Satgas Monev Kinerja, pimpinan Tim Penyusun Renstra, PPK, BP Penerimaan dan Pengeluaran, BPP Rektorat/Fakultas/Pascasarjana dan Lembaga, pimpinan KIRDTI serta pimpinan PFJP.

Ada juga Tim WCU, Satgas Humas dan Kerja Sama, LMMC, Satgas Satu Data, pimpinan Optimalisasi Aset, pimpinan Kantor Sekretariat BLU, pimpinan Pokja Sustainability dan Sistem Integrasi, pimpinan Pokja Kepegawaian dan pimpinan Pokja BMN. (nan/\*)



**Universitas**  
**LAMBUNG MANGKURAT**  
*Waja Sampai ka Puting*

**MERDEKA**  
**BELAJAR**

**Kampus**  
**Merdeka**  
INDONESIA JAYA



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BARITO POST**



Kamis  
20 Februari 2025

# ULM Bisa Fokus ke Akademik

■ UU Minerba Batal Beri Izin Tambang ke Kampus

**BANJARMASIN, BPOST** – Keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberian izin tambang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi menuai beragam tanggapan dari akademisi di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI, yang mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Ahmad menyatakan, pihaknya menerima keputusan ini. Ia yakin pemerintah menetapkan kebijakan ini dengan pertimbangan yang komprehensif. "Jadi kita ikuti saja aturan dan kebijakan yang ada. *Saudra wa athena*," ujarnya.

Prof Ahmad tadinya menyambut positif wacana pemberian WIUPK kepada perguruan tinggi karena dinilai dapat membantu mengurangi beban Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Namun, setelah keputusan pembatalan, ia menyatakan kampus akan lebih fokus pada misi utama perguruan tinggi, yakni pengembangan akademik. "Dengan ini, akan konsentrasi meningkatkan akreditasi ULM," katanya.

Dampak terbesar dari keputusan ini juga dirasakan oleh perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban).

Direktur Poliban, Joni Rudi menilai, meski kebijakan ini membatasi peran kampus dalam pengelolaan tambang, pihaknya tetap siap mendukung in-

dustri dengan mencetak tenaga kerja terampil. "Kami tidak bisa mengelola tambang, tapi kami bisa menyiapkan SDM yang siap kerja. Harapannya, dengan keputusan ini, pemerintah juga memastikan adanya alokasi dana riset dan beasiswa yang memadai untuk kampus-kampus di daerah," katanya.

Terpisah, batalnya UU yang memberi izin kampus kelola tambang dinilai tepat oleh dosen Fakultas Teknik ULM, Akbar Rahman. Dia menilai langkah ini tepat karena kampus seharusnya tidak terbebani dengan urusan bisnis tambang. "Ini kabar yang sangat bagus. Kampus dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak seharusnya pecah fokus dengan keharusan mengelola perusahaan tambang," ujar Akbar. (mar)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST

Jumat  
21 Februari 2025

# FRI Bentangkan Spanduk Indonesia Gela

## ■ DPRD Kalsel Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Pusat

**BANJARBARU, BPSOBT** - Sejumlah kebijakan pemerintah membuat Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) bereaksi. Mereka pun menggelar aksi pembentangan spanduk #IndonesiaGelas di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, Kamis (20/2) siang.

Perwakilan Altansi, Faldhy M mengatakan aksi ini merupakan ungkapan moral menanggapi isu-isu yang terjadi satu minggu terakhir di tingkat nasional. "Di antaranya efisiensi anggaran hingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG)," jelasnya.

Faldhy mengatakan aksi yang sama ini dilakukan

### STORY HIGHLIGHTS

- Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menggelar aksi pembentangan spanduk #IndonesiaGelas di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru.

- Indonesia Gelas menjadi tema aksi mahasiswa dan masyarakat sipil mengkritik kebijakan pemerintah.

oleh teman-teman golongan BEM, dan mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia.

"Ini adalah bentuk kolektif rekan-rekan di Kalsel

yang masih sadar dan ingin terlibat dalam penyuaran gerakan Indonesia gelap," katanya.

Ia menjelaskan, eskalasi Indonesia Gelas jika menjurus ke wilayah Kalimantan

Selatan berbarengan dengan adanya pelantikan Gubernur dan belasan Kota/Bupati di Borneo. "Kami ingin mend

● Hal 15 kol 4-7

## HMI: Efisiensi Tambah Persoalan

100 hari lebih kinerja Presiden RI, Prabowo Subianto di sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarbaru.

Salah satu sorotan organisasi mahasiswa ini terkait efisiensi anggaran dan pelaksanaan program makan bergizi

● Hal 15 kol 1-3

## FRI Bentangkan..

● Sambutan Hal 13

moment di pelantikan ini menjadi sebuah warning keras untuk terus aktif berkegiatan menyuarakan aspirasi dan hak masyarakat kecil. Baik di level pemerintahan pendik, menengah maupun hingga parlemen," jelasnya.

Ia mengatakan mengingat lima tahun mendatang pemilihan umum akan digelar, maka ini menjadi momen penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat melalui DPRD RI," ujarnya.

"Kami telah menyelesaikan tugas ini dengan menyerahkan tuntutan kepada pemerintah pusat melalui DPRD RI," ujarnya.

Adapun sebagai tindak lanjut dari aksi demo pada 17 Februari, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil ke DPRD RI, Kamis (20/2).

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jami, ditugaskan untuk menyerahkan aspirasi tersebut langsung ke gedung DPR RI di Senayan.



DANUARDIN PUSAT/DAKAR

**AKSI** - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi #IndonesiaGelas di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru.

"Kami telah menyelesaikan tugas ini dengan menyerahkan tuntutan kepada pemerintah pusat melalui DPRD RI," ujarnya.

Ia berharap, aspirasi yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut dapat menemui titik tengah dan solusi.

Mahasiswa menolak pemangkasan anggaran pendidikan, pengurangan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOP-PTN) dan Biaya Penyelenggaraan Per-

guruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPTN-BH) hingga 50 persen, yang dinilai menghambat akses pendidikan dan riset.

Mereka juga menolak pemangkasan anggaran kesehatan, termasuk BPJS dan subsidi kesehatan, serta mendesak pengurangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran.

Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ady Jayadi menegaskan, aksi ini merupakan desakan agar pemerintah mempertimbangkan kem-

berhasilan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Selain itu, mahasiswa mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, penyelesaian RUU Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak mereka, serta evaluasi proyek strategis nasional yang dinilai lebih menguntungkan korporasi dibanding masyarakat luas.

Mereka juga mengkritik RUU Mitraba yang sempat mengikis anggaran tinggi mengelola tambang meski telah dibatalkan. (mar/mun)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Senin  
24 Februari 2025



### Melukis Buat...

● Sambutan Hal 1

Tidak sekadar mengungkap perasaan, melukis menjadi cara Alya untuk membuat perasaannya men-

jadi tenang. Tak heran bila Alya memilih untuk melukis ketika merasa lelah usai melewati aktivitas sehari-hari.

"Misalnya lagi banyak tugas atau sedang ada masalah dengan teman, pelarian saya ya melukis," ucapnya. (mal)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

12 MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 Banjarmasin & Post

# Fiksi Tapi Membawa Realita

**HIDUP** di desa yang mengalami keterbatasan suplai listrik, menjadikannya tak punya hiburan berbasis elektronik macam televisi. Sebagai gantinya, ayah dan ibunya mengajak ke perpustakaan sekolah.

Gadis asal Desa Halim Makmur, Kecamatan Sungai Piting, Kabupaten Tapin tersebut disuguhkan aneka bacaan cerita rakyat bergambar dari seluruh Nusantara.

Menurut Tria Mellinia Satya Pratiwi, awalnya seorang guru. Sebab itulah Tria kecil diberikan dunia baru agar senang belajar.

"Sejak masuk ke, membaca menjadi bagian dari hidup saya yang sulit terpisahkan," ungkap gadis kelahiran Banjarmasin, 14 Januari 2000 ini.

Genre bacaan yang sering ia konsumsi kebanyakan fiksi, mulai dari kumpulan cerita pendek, fiksi buatan penggambar, novel maupun puisi.

"Membaca menjadi pelampiasan saya setelah menyelesaikan semua kewajiban harian sebagai seorang mahasiswa dan tritir bahasa Inggris. Sebelum tidak biasanya pengantar saya adalah dengan membaca terlebih dahulu," katanya.

Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bahasa Inggris, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini saat ini sedang menempuh studi magister.

"Lain tentunya apabila weekend, saya bisa berghat lebih lama di dunia fiksi dari genre fiksi yang saya baca," ungkapnya.

Dari membaca ia merasa diajarkan bagaimana mematuhi norma. Dulu ia sering minder karena merasa bahwa dunia fiksi, namun sekarang sudah berdamai dengan diri dan merasakan sendiri manfaat dari membaca fiksi.

Ia belajar memandang dunia dari lensa multivisi dari multivisi, belajar memahami manusia dan perilakunya dari berbagai sudut pandang dari norma. Dari membaca saya belajar menguasai kemampuan interpersonal dan intrapersonal diri," jelasnya.

Tria tidak punya jadwal khusus memilih buku, namun seringnya self review untuk diri sendiri setelah menyelesaikan suatu goal dalam hidup adalah dengan membeli buku yang ada dalam wishlist pribadinya.

Kebanyakan ia beli offline karena ada maana tersendiri untuk mengunjungi toko buku, berkenalan dengan buku-buku baru di etalase dan akhirnya memutuskan membeli buku yang berhasil menarik perhatiannya.

Seleksi kebangsaan saja, dikumpulkan satu per satu dari berbagai tempat dan acara, dengan uang jajan sendiri pula, sedang beberapa tahun lamanya, saya punya koleksi Looker Pelangi. Yang masih terus saya usahakan kringkapsnya ialah seri Harry Potter juga Hunger Games. Yang saya punya sekarang ialah versi terjemahannya dan yang sedang saya beli adalah versi aslinya dalam bahasa Inggris," paparnya.

Buku spesial dan berkesan adalah berjudul Laut Bercerita. Ini buku yang merupakan kisah nyata yang ditulis oleh ayah saya berjudul Majapahit, Perang Bubat dan sebagainya.

Laut Bercerita yang menjadi bel pengingat, bahwa historical fiction atau fiksi sejarah itu salah satu yang ia cinta.

Buku ini merupakan buku untuk yang di halaman pertama kita sudah tahu akhirnya tapi tetap kita dan berdarah saat dibawa lembar demi lembar ke dalam cerita.

Semakin mendalami akhir, semakin terasa enak di dada, karena makin benar buku ini memang fiksi tapi ia juga membawa realita nyata. Soal hulu-hulu yang masih diperjuangkan tiap Karna di depan istana negara. (dea)

## Berlayar di Lautan Ilmu

**MENURUT** Tria, jika ingin betah membaca maka cari buku sesuai panggilan jiwa. Jenis buku di dunia sangat banyak, ditulis oleh penulis-penulis luar biasa.

"Pili kita hanya perlu mencari satu titik di dunia kita ini dimana kita merasa ditantang dan diterima sebagai bagian," tukasnya.

"Temukan jawaban dalam buku dan selamat berlayar di lautan ilmu," kata penghiber membaca genre fiksi, mantan film dan penulis puisi.

Adapun prestasi diraihnya 100 Besar Puisi Terbaik dalam Lomba Cipta Puisi Nasional oleh Esat Menulis Nasional 2023, Oktofinalis Debat Bahasa Inggris tingkat nasional dalam National University Debating Championship (NUDC) tahun 2020 oleh Pusprenas, Kemendikbudristek.

Juara 3 Debat Bahasa Inggris Polibat Open Debate 2020 oleh Politeknik Negeri Banjarmasin. Juara 2 Debat Bahasa Inggris MTQM tingkat Universitas Lambung Mangkurat tahun 2019. (dea)

**TRIA MELLINIA SATYA PRATIWI**

PHOTO TRIA MELLINIA SATYA PRATIWI UNTUK BERITA

Resensi



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## BARITO POST



# ULM tidak Naikkan UKT

**Rektor: Demi Ringankan Beban Orang Tua**  
**Mendikti: Jangan Ada Miskomunikasi yang Meresahkan Mahasiswa**

Danjumasin, BARITO - Di tengah efisiensi anggaran saat ini, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) pada penerimaan calon mahasiswa baru 2025 demi meringankan beban orang tua.

"Kami juga tidak mem-berlakukan Jalan Pengembangan Institusi (JPI) pada tahun ini," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim. Baku di Banjarmasin, kemarin.

Menurut Alim, kebi-jukan itu sebagai komi-tasi ULM mengoptimalkan biaya pendidikan tinggi terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan bagi mahasi-swa, demi terciptanya

sumber daya manusia harapan bangsa ke depan. UKT atau sumbangan pengembangan pen-di-dikan merupakan seba-gian biaya kuliah yang ditanggung mahasiswa di perguruan tinggi negeri berdasarkan kemampuan ekonominya.

Sementara itu, kebi-jukan ini sebagai komi-tasi ULM mengoptimalkan biaya pendidikan tinggi terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan bagi mahasi-swa, demi terciptanya

Alim menambahkan, ULM menyelenggarakan proses seleksi dilak-ukannya transparan dan berintegritas tinggi untuk menyeleksi calon mahasi-swa terbaik sesuai kemampuan akademik yang dimiliki tanpa adanya unsur-unsur lain

di luar ketentuan. ULM juga tidak beke-ja sama dengan pihak lain dalam penerimaan mahasi-swa baru serta tidak menerima segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan kegiatan dalam penerimaan mahasiswa baru.

"Walaupun ada oknum yang menawarkan keikutsertaan kami pastikan itu tidak benar dan harap

lepasan," tegasnya. Taburi, ia menambahkan bahwa program studi saja dan dua program di (D3) bagi calon siswa baru yang be-meritologi tinggi mengikuti seleksi perguruan tinggi ternak dan terak (Pati Kalsel dan I). Sedangkan, Y Pendidikan Tinggi, dan Teknologi (Mk bersambung ke

## ULM Tidak...

Sainstek Brian Yudarto memastikan bahwa tidak ada kenaikan UKT bagi mahasiswa.

Dalam rapat pertama bernama Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia, Brian meminta para rektor menyanggahkan hal terse-but.

"Saya minta kolaborasi para rektor dan kepala LLDIKTI informasikan sebaik-budanya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT," ujar Brian dalam keterangannya, Jumat (21/5/2025) lalu.

Brian juga mengimbau para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasi-swa, membuka ruang diskusi, dan menyain-

palkan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT. "Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa," katanya.

Brian menegaskan, Kemdikbud Sainstek tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Dia juga menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar selama ini tidak terjadi kesalahpahaman.

"Mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan bea-siswa dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga," ujarnya.

Brian menyebut, perguruan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama per-tumbuhan ekonomi nasional.

"Kami mendorong dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Brian meng-ajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersin-ergi serta memberikan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebelumnya beredar kabar bahwa UKT di

## Sambungan hal 1

sejumlah perguruan tinggi negeri berpotensi naik. Imbas adanya efisiensi anggaran pendidikan, Kemdikbud Sainstek diketahui berencana pemangkasan anggaran mencapai Rp 14,5 triliun. Akibatnya, pagu anggaran awal Rp 56,6 triliun meru-ah di Rp 42,1 triliun.

Pemangkasan anggaran di Kemdikbud Sainstek tersebut sempat dikawatirkan memengaruhi anggaran untuk beasiswa, terutama KIP-Kuliah. Meski potensi kenaikan UKT dan berkurangnya beasiswa KIP sudah di-bantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi kekhawatiran tentang kenaikan UKT masih men-jadi pertimbangan di masyarakat.

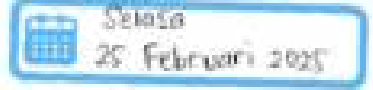


## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN



# Respons Hasil Putusan MK atas Pilkada Banjarbaru dan Harapan Kedepan



Oleh  
**TAUFIK ARBAIN\*)**

SAYA kira semua pihak patut memberikan apresiasi dan menghormati hasil putusan MK terkait persoalan Pilkada Kota Banjarbaru 2024 lalu. Ada beberapa catatan penting dari putusan MK dalam menyiapkan dinamika politik Kota Banjarbaru 2025.

Pertama, Semua pihak tentu wajib menghormati hasil putusan MK, di mana diperintahkan dilakukan PSU Pilkada Banjarbaru dalam 60 hari kedepan. Bahwa adanya Keputusan KPU saat Pilkada November 2024 didasarkan adanya pelanggaran dari paslon 1 sehingga adanya gugatan ke MK karena

pun adanya dugaan cacat penyelenggaraan sehingga harus meminta fatwa MK lewat gugatan.

Bahwa putusan ini adalah tindak baik pengulangan proses demokrasi ini yang akan mampu mengantar pilihan Kepala Daerah diserahkan kepada public untuk dipilih nanti.

Kedua, Karena PSU dan paslon hanya 1 untuk melawan kotak kosong, dalam ruang demokrasi semua pihak pun harus menghormati hak-hak paslon dan tim dalam melaksanakan usaha-usaha mempengaruhi public mengajak untuk memilih paslon ter-

sebut. Ini menurut saya hal penting ketika kita mengedepankan makna demokrasi bahwa adanya penghormatan terhadap usaha paslon menjadi peserta pilkada.

Ujian memaknai demokrasi adalah Ketika warga dan para aktor mampu menghormati proses demokrasi dan memberikan kedamaian prosesnya.

Tentu tantangan demokrasi akan memungkinkan adanya framing-framing liar yang mengganggu proses demokrasi itu sendiri. Di sinilah ketika makna demokrasi dihadirkan kuat untuk menjawab cacat

pelaksanaan pilkada, maka makna demokrasi juga dihadirkan kuat saat proses demokrasi pada PSU nanti.

Proses pengawasan penting tidak kadar pada usaha-usaha yang dilakukan paslon, tetapi pengawasan juga pada pihak-pihak yang melakukan framing liar mengganggu proses demokrasi.

Termasuk saya kira, pihak KPU dan Bawaslu harus Kembali ke titik khittah fungsi sebagai penyelenggara dan wasit dalam Pilkada. (\*al/sbx)

\*) Dosen Fisip Universitas  
Lambung Mangkurat



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

## RADAR BANJARMASIN

Selasa  
25 Februari 2025

### MK Benteng Terakhir Keadilan

**BANJARMASIN** – Keputusan MK membatalkan hasil Pilwali Banjarbaru pada 27 November 2024 lalu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.

Pengamat politik Fisip ULM, Mahyuni menyampaikan bahwa keputusan PSU untuk Pilkada Banjarbaru ini harus dikawal secara maksimal. Tak hanya oleh pengawas dari lembaga kependidikan. Namun, dari seluruh elemen masyarakat di Banjarbaru melalui pengawasan partisipatif.

Mantan Ketua Bawaslu Kalsel ini menyebut tingkat kepercayaan masyarakat Banjarbaru sempat rendah terhadap penyelenggara pemilu. ■

► Beca MK... Hal 5



KPU Banjarbaru menetapkan dua pasangan calon di Pilkada Kota Banjarbaru (Erna Lisa Halaby-Wartono, dan Aditya Muli Arifin-Said Abubakar) pada 22 September 2024.

Aditya diajukan oleh Wartono ke Bawaslu Kalsel pada 21 Oktober 2024, atas dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah.

Pasangan Aditya-Said didiskualifikasi oleh KPU Banjarbaru atas rekomendasi Bawaslu Kalsel pada 1 November 2024.

Meski didiskualifikasi sebagai pasangan calon, KPU tetap memasang foto Aditya-Said pada saat suara yang dipeka saat pemungutan suara 27 November 2024. Dengan ketentuan, berapapun suara pasangan ini maka dianggap tidak sah.

Dari hasil rekapitulasi suara, Lisa-Wartono meraih sebanyak 35.135 suara sah, sementara suara tidak sah mencapai 78.736 suara.

Dari hasil ini, empat gugatan Persetiaan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari empat gugatan, hanya satu yang diterima MK untuk dilanjutkan ke pembuktian hingga diputuskan.

Gugatan tersebut diajukan Muhammad Arifin selaku pemantau pemilihan dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan.

Akhirnya Hakim MK memutuskan Pilwali Banjarbaru dilakukan PSU yang dilaksanakan dalam 60 hari setelah putusan dibacakan.

Mekanisme PSU memuat gambar pasangan Lisa-Wartono dan satu kolom kosong tidak bergambar.



**BANJARMASIN** – Panjangnya proses sidang sengketa perkara Pilwali Banjarbaru berakhir Senin (24/2). Meski menggabungkan permohonan sebagian, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam putusan yang dibacakan Ketua MK Suharto, Pilwali Banjarbaru diperintahkan dilaksanakan dalam 60 hari setelah putusan dibacakan.

MUHAMMAD FAZRI  
Ketua Tim Banjarbaru Hanyar

Mekanisme PSU tak lagi memuat gambar pasangan calon di satu suara. Sebelumnya, masih memuat foto Erna Lisa Halaby-Wartono dan Aditya Muli Arifin-Said Abdullah. Namun, dalam PSU nanti hanya memuat gambar pasangan Lisa-Wartono yang akan melawati kotak kosong. Dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom. Terdiri atas 1 kolom yang memuat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Erna Lisa Halaby-Wartono) dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar, sebut Suharto.

Dalam salah satu amar putusannya, MK juga memerintahkan KPU Banjarbaru untuk melaksanakan PSU pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). ■

► Beca Suara... Hal 5



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
25 Februari 2025

## Rektor: ULM Tidak Menaikkan UKT dan IPI

**BANJARMASIN, BPOST** - Kebijakan efisiensi anggaran terus menjadi pertimbangan hangat di masyarakat, karena diyakini akan berdampak pada berbagai bidang termasuk di dunia pendidikan. Salah satunya yang cukup ramai dibicarakan adalah terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Namun terkait hal ini, Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Dr Ahmad pun mengemukakan tidak ada kenaikan UKT. "Insya Allah tidak mengalami kenaikan," ujarnya, Senin (24/2).

Tidak hanya itu, Prof Alim Bachri menambahkan bahwa pihaknya pun juga akan membuat kebijakan yang bahkan lebih meringankan.

Pada hari senanya juga forum Pengembangan Institusi (PI) pun tidak akan diberlakukan.

"Insya Allah istiqomah. Sedapat mungkin tidak memberatkan masyarakat," tutupnya.

Bagi Rektor, kebijakan itu sebagai komitmen ULM mewujudkan biaya pendidikan tinggi terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan perkuliahan bagi mahasiswa demi terwujudnya sumber daya manusia harapan bangsa ke depan.

Sementara itu dikutip dari laman resmi ULM, ada sebuah berita dengan judul Penerimaan Mahasiswa Baru ULM 2025: Tanpa Kenaikan UKT dan Tanpa IPI.

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Rektor ULM telah membuat Surat Edaran yang memuat beberapa point penting terkait UKT dan juga IPI.

Misalnya pada point 3 disebutkan bahwa ULM tidak memberlakukan kenaikan UKT pada tahun 2025. Kemudian pada point 4 disebutkan ULM tidak memberlakukan IPI pada 2025.

Prof Ahmad menambahkan, ULM menyelenggarakan tes masuk secara

ketat bagi calon mahasiswa baru agar memperoleh calon yang unggul dan berkualitas.

Proses seleksi dilaksanakan transparan dan berintegritas tinggi untuk menjaring calon mahasiswa terbaik sesuai kemampuan akademik yang dimiliki tanpa adanya unsur-unsur lain di luar ketentuan.

ULM juga tidak bekerja sama dengan pihak lain dalam penerimaan mahasiswa baru serta tidak menerima segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan ketiduran dalam penerimaan mahasiswa baru. "Waspadalah penipuan ataupun ada oknum yang menawarkan ketiduran, kami pastikan itu tidak benar dan harap laporkan," tegasnya.

Tahun ini ULM menawarkan sebanyak 66 program studi sarjana (S1) termasuk dua program diploma (D3) bagi calon mahasiswa baru yang berminat mengikuti seleksi masuk. (ant/ran)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

**BANJARMASIN POST**

Selasa  
25 Februari 2025

## Video Abe Borneo Curi Perhatian Nitizen

Mahasiswa Papua Pegunungan Bikin Konten Berbahasa Banjar

**SOSOK** salah seorang mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Andarias Bayage belakangan cukup menjadi perhatian netizen di laman.

Pria yang akrab disapa Abe Borneo ini begitu dikenal karena aktivitasnya sebagai seorang konten kreator.

Dan konten yang dibuatnya di antaranya adalah video-video ketika sedang mengunjungi sejumlah tempat wisata di Kalimantan Selatan

**Young  
chat**



Jejak Konten Kreator Abe Borneo, Jalur Ternak Untuk Seli Drone

● Hal 11 Kol 1-3



**KONTEN** - Abe Borneo, mahasiswa ULM asal Papua Pegunungan yang merupakan kreator konten saat tampil di program Young Chat BPost.

### Video Abe..

● Sambungan Hal 9

(Kalsel).

Kemudian yang menariknya, Abe membuat kontennya menggunakan bahasa Banjar dan diposting di akun Instagramnya @abe\_borneo.

Abe pun menggunakan bahasa Banjar namun ciri khas logat turah kelahirannya tetap tidak hilang.

Adapun konten yang dibuatnya di antaranya di Tahura Sultan Adam Marsh Angin, Bukit Batu, Matang Keladan dan sebagainya.

Kepada BPost, Abe pun mengaku tidak menduga bahwa konten yang dibuatnya ternyata berhasil mencuri perhatian netizen.

"Sebetulnya tidak mendu-

ga dan kaget juga, ternyata banyak notifikasi yang masuk saat diposting di Instagram," ujar Abe saat berbincang dalam program Young Chat yang dipandu Bagus dan Syakira tersebut.

Abe sendiri mengaku saat ini dirinya tinggal menunggu proses wisuda, dan dirinya pun memanfaatkan waktunya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Kalsel.

"Tinggal menunggu wisuda, jadi saat ini fokus untuk membuat konten tempat wisata di Kalsel. Rencananya mau ke Bukit Batu dan juga Gunung Halau-Halau," jelas pria asal Wamena, Provinsi Papua Pegunungan ini.

Abe pun menerangkan bahwa dirinya mulai tinggal di Kalsel pada 2019, dan di-

rinya masuk ULM pada jalur afirmasi.

Dan dalam perjalanannya, Abe pun mengaku belajar menggunakan bahasa Banjar, terlebih dirinya pun banyak juga berteman atau berinteraksi dengan mahasiswa Banjar.

"Saya bergaul dengan teman-teman Banjar, bahkan Dayak dan sebagainya. Dan seiring waktu, saya pun mulai bisa berbahasa Banjar dan sampai sekarang masih terus proses belajar," terangnya.

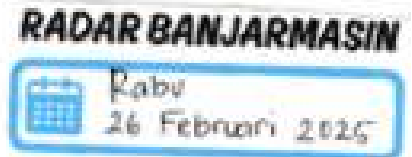
Sudah lebih dari lima tahun tinggal di Kalsel, Abe pun mengaku dirinya mulai keramah untuk tetap tinggal di Kalsel. "Awalnya sempat mau pulang. Tapi lama kelamaan mulai betah, dan berharap juga dapat pekerjaan di sini nantinya," pungkasnya. (ran)



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa



# Opini

## Varisan dan Tantangan untuk Walikota Hanyar



Oleh

SITI MAULIANA HAIRINI<sup>1)</sup>

perlu segera ditinjau terkait pengelolaan wilayah yang merupakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang masih belum efektif, dengan berbagai persoalan turunan yang menyertainya. Hamdi, ahli Tata Kota dan Lingkungan di Banjarmasin, menilai, Pemerintah Kota Banjarmasin masih setengah hati menanggapi soal sampah. "Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini tidak punya road-map jelas," kata mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin ini saat ditemui dalam diskusi bersama Walikota Terpilih H. M. Yamin dan Forum Ambin Demokrasi beberapa waktu yang lalu. Sanksi penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) Basrah Banjarmasin oleh Kementerian Lingkungan Hidup bakal peka di pengujung kepemimpinan Ibnu Sina bahkan hal ini dapat menjadi menjadi simbol kegagalan visi "Banjarmasin Bersih dan Nyaman" selama dua periode.

Hal ini tentu menjadi pembelajaran bagi H. M. Yamin yang merupakan Walikota Hanyar yang akan memimpin Kota Banjarmasin, agar secara serius merancang Pembangunan serta program prioritas berdasarkan kebutuhan Masyarakat Kota. Visi "Maju dan Sejahtera" yang dikampanyekan serta menjadi mayoritas pilihan Masyarakat Kota Banjarmasin adalah kemiskinan yang harus dikepalakan oleh pasangan Yamin dan Ananda Pembangunan kota yang maju adalah kota yang berbudaya

MASA jabatan baru punya banyak waktu untuk meninjau dan kepemimpinan kota yang berbudaya dan berkeadilan.

Kota Banjarmasin selama dua periode (2016-2021 & 2021-2024) secara de jure telah sukses dilevelkan dibawah kepemimpinan Ibnu Sina, namun secara de facto tata kelola perkotaan masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk dilevelkan pentanangan selanjutnya. Dua periode ini bukanlah waktu singkat namun juga tidak cukup panjang untuk menyelesaikan segala urusan marut di Kota yang menjelang usia 500 tahun ini. Tulisan ini mencoba menapakan dari sisi mata uang dari keberhasilan sekaligus permasalahan di masa Kepemimpinan Ibnu Sina selama dua periode yang lalu sebagai warisan serta tantangan bagi kepala daerah Kota Banjarmasin di masa mendatang.

Pada masa kepemimpinan Banjarmasin BAJMAN jilid pertama, telah tercatat satu keberhasilan yang membanggakan 2500 wirausahawan baru dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan laporan dari website satu data provinsi Kalimantan, target tersebut telah tercapai dalam masa satu tahun kepemimpinan Ibnu Sina di Kota Banjarmasin, pada tahun 2016 terdapat 31.416 UMKM yang tercatat bertambah menjadi 36.781 UMKM di tahun 2017, kemudian di tahun 2020 (tahun pengujung kepemimpinan Banjarmasin "Bajman" periode pertama) jumlah UMKM meningkat drastis dari 36.329 (tahun 2019) menjadi 40.584 UMKM. Tahun 2021 jumlah UMKM terus hingga 37.214, dan tahun 2022 angka itu kembali stagnasi. Menurutnya, dua jumlah penciptaan wirausaha baru mampu menembus hingga dua kali lipat dari target yang diumumkan menjadi pembuktian akan komitmen politik Ibnu Sina dalam memimpin kota Banjarmasin. Namun rentetan angka ini juga menunjukkan fenomena fluktuasi angka yang begitu tajam hanya pada tahun awal dan akhir masa jabatan walikota di periode pertama. Angka pertumbuhan yang tidak stabil menunjukkan minimnya konsistensi program dalam pertumbuhan UMKM baru. Selama

dua capaian program terwujud hanya mengejar angka besar di tahun-tahun pertama namun meninggalkan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam mendorong Kota Banjarmasin sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Kemudian, catatan keberhasilan kepemimpinan Walikota Ibnu Sina selama dua periode juga di tandai dengan ditulainya 156 penghargaan di periode pertama dan 400 lebih penghargaan di periode kedua baik di tingkat lokal hingga nasional. Beberapa penghargaan dan prestasi terbaik yang diterima oleh pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Ibnu Sina - Arifin Noor, yaitu Kota Banjarmasin meraih penghargaan Innovative Government Award 2023, sebagai Kota Sangat Inovatif di level nasional. Selain itu, kemudian, Kota Banjarmasin mendapatkan penghargaan sebagai Top 10 Pemerintah Kota dalam Digital Government Award pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Di tahun yang sama Kota Banjarmasin kembali mendapatkan penghargaan Wabatu Tatu Nugraha (WTN), penghargaan yang diberikan atas keberhasilan kota dalam memata transportasi dan fasilitas publik yang serba dan efisien bahkan pengujung kepemimpinannya Banjarmasin berhasil meraih predikat A untuk kepuasan pelayanan publik. Deretan Paang prestasi yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam 20 program prioritas dari "Banjarmasin Bersani dan lebih bermanfaat" yang di sandingkan kepada kota Banjarmasin ternyata telah mengantarkan satu permasalahan dasar perkotaan yaitu persoalan penanganan sampah yang sudah tidak dapat di toleransi lagi.

Sejak tanggal 1 Februari 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan sanksi administratif ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basrah, karena masih menunggakan masalah pembangunan terbuka (open dumping). Padahal rata-rata rata tidak kurang dari 100 ton sampah per hari yang harus dikelola oleh pemerintah kota. Hal lainnya yang

dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakatnya. Dan kata Sejahtera merupakan wujud dari tercapainya kualitas kehidupan Masyarakat yang optimal dan selaras dengan entitas lainnya. Kedaulatan dan kualitas kehidupan menjadi dua kata kunci dalam kepemimpinan Yamin dan Ananda untuk menyelesaikan berbagai persoalan prioritas dan persoalan warisan yang masih belum terselesaikan.

Penanganan Sungai sebagai program prioritas adalah mandat yang harus di tunaikan dalam membenahi kota tertua di Kalimantan yang dianugerahi oleh Tuhan dengan kontur topografi sebagai kota Sungai, selain itu warisan akan kekeliruan penanganan sungai juga menghadirkan persoalan mendesak lainnya yang perlu segera ditangani oleh H.M. Yamin-Hj. Ananda yaitu upaya untuk melakukan normalisasi sungai secara tepat. Meskipun dua periode yang lalu Pembangunan yang mengarah pada revitalisasi Sungai telah dilakukan, hanya saja Musibah banjir besar yang dialami masyarakat Kota Banjarmasin diawal 2021 yang lalu telah membuka mata banyak pihak bagaimana rapuh dan sengkarutnya ketahanan Banjarmasin terhadap bencana. Bahkan desember 2024 dibeberapa titik terdapat banjir Rob dengan ketinggian yang bervariasi, hal ini tentunya diakibatkan karena banyak sungai yang tidak berfungsi dengan baik, khususnya sebagai jalan air dan pengendali banjir. Sungai-sungai yang dulunya memiliki fungsi sebagai jalan air ternyata saat ini sebagian sudah mengalami penyempitan aliran, diurut, tertutup bangunan dan mengalami pendangkalan (sedimentasi). Belum lagi desain sistem drainase yang kurang efektif dalam mempercepat turunya air ke sungai-sungai, sehingga jika terjadi hujan dan air pasang maka air bertahan cukup lama yang menggenangi berbagai lokasi dan ruas-ruas jalan di Banjarmasin. revitalisasi Sungai seakan menjadi ajang eksploitasi yang terus-menerus dipraker dengan program beautifikasi, hal ini mengikis keindahan dan fungsi alamiahnya. Komitmen Yamin dan

Ananda untuk mengembalikan fungsi dan kejayaan Sungai sebagai pusat peradaban Masyarakat Kota Banjarmasin tentunya menjadi oase ditengah ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir musiman.

Persoalan yang menunggu penanganan berikutnya juga masih terkait persoalan pengelolaan air, yakni Perusahaan Daerah Pengolah Air Limbah Domestik (PD PALD) yang terancam gulung tikar. Hal ini terjadi karena jumlah pelanggan PD PALD masih di bawah 10% jika dibandingkan dengan jumlah PT PAM Bandarmasih, sehingga PD PALD tidak mampu lagi membiayai operasional perusahaan pengelola air limbah satu-satunya di Indonesia ini. Ditambah penekanan stunting yang kembali meningkat dipertengahan tahun 2024 dari 22,4% menjadi 26,5% dan semakin jauh dengan angka target pemerintah pusat yaitu 14%. Meskipun ditahun sebelumnya, kepemimpinan Ibnu Sina dan Arifin Noor telah berhasil menurunkan ke angka 20% dari 27%, data ini kembali menunjukkan inkonsistensi performa implementasi kebijakan oleh pemerintah kota Banjarmasin dibawah kepemimpinan Ibnu Sina. Rentetan catatan mengenai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banjarmasin saat ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh H.M. Yamin dan Hj. Ananda sebagai Walikota dan wakil Walikota terpilih yang akan segera dilantik pada 20 Februari 2024 ini. Berkenaan dari pengalaman kepemimpinan sebelumnya, maka Kota Banjarmasin tidak hanya membutuhkan pemimpin yang visioner, namun juga harus ditopang dengan konsistensi dan komitmen politik dalam mendorong perbaikan kota secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan raihan dan perpaduan yang tepat, H.M. Yamin sebagai wali kota hanyar tentu tidak hanya dapat mewujudkan Kota Banjarmasin yang Maju dan Sejahtera, serta memberikan dampak berkelanjutan yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. (\*/al/sbx)

<sup>1)</sup> Akademisi FISIP ULM



## Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

4 RABU, 26 FEBRUARI 2025 | Banjarmasin & Post

# Menanti Gebrakan Menteri Baru

**MENTERI** Dikti Sains Teknologi (Sainstek) yang baru dilantik (19/2/25) menggantikan menteri yang lama. Soemantri Brodjonegoro diganti oleh Brian Yuliarto. Kedua sosok ini baik yang diganti maupun yang menggantikan sama-sama memiliki kecakapan masing-masing. Jika muncul pertanyaan, mengapa Soemantri Brodjonegoro diganti oleh Brian Yuliarto, yang dapat menjawab adalah Prabowo Subianto sebagai Presiden sebagai pemilik hak prerogatif.

Memang masih seumur jagung kemudian dicopot jabatannya sebagai Menteri Dikti Sainstek (terlepas dirinya menyatakan mundur sebelum diganti oleh Brian Yuliarto), hanya Presiden yang dapat menjawab. Terlepas apapun jawabannya, alasan yang paling sederhana dinarasikan adalah kinerja Soemantri Brodjonegoro tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi Presiden. Kepemimpinan selama Soemantri menjadi Menteri Dikti Sainstek sering membuat kegaduhan dan mengundang reaksi negatif. Bukan positif tidak hanya dari para pegawainya di kementerian Dikti Sainstek namun juga bagi civitas akademika di hampir semua perguruan tinggi di republik tercinta ini. Menjadi wajar jika kemudian, dilakukan reshuffle.

Menjadi pejabat dengan memegang Kementerian Dikti Sainstek sudah semestinya dipahami sebagai amanah yang kemudian perlu diterjemahkan dalam kerja-

lakukan kerja-kerja mencetak sumber manusia unggul. Kehadiran kurikulum memberikan sumbangsih besar kemana setiap mahasiswa di setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta akan diarahkan. Membangun manusia Indonesia melalui perguruan tinggi membutuhkan kehadiran pendidikan tinggi yang tidak bisa diabaikan eksistensinya.

Mencetak manusia dalam konteks membangun kerangka berpikir dan membentuk karakter membutuhkan formula yang utuh dan berkelanjutan jika kita menghendaki pembangunan manusia Indonesia berkelanjutan. Apa yang kemudian menjadi catatan kritis adalah pendidikan tinggi akan selalu berjalan kelindan dengan proses memantapkan manusia, mengarahkan setiap proses belajar mengajar mahasiswa untuk mengenal dan mengkreasi realitas.

Mendekatkan mahasiswa kepada fakta dan realitas sebagai sumber belajar untuk semakin matang dan dewasa menjelang kehidupan adalah sebuah hal niscaya. Memberikan ruang belajar (safety) kepada mahasiswa perlu dikordinasikan dengan baik. Kita mengidentifikasi ada limpatan besar yang dilakukan seorang Brian Yuliarto ketika menahkodai Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi.

Poin empat dari Asta Cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden ada-

lalu mendukung peraturan tersebut untuk diimplementasikan, semua pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, civitas akademika kampus pun menunggu kepastian kebijakan tersebut. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak terkait bagaimana setiap anak Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi belajar dan mengembangkan kapasitas dirinya.

Setali tiga uang, di tengah kebijakan negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran, apakah ini berdampak kepada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Semoga tidak. Namun terlepas apapun jawabannya, akses pendidikan yang dapat dinikmati semua anak Indonesia memerlukan bukti nyata. Dengan cara apapun yang mungkin dicari terobosan kebijakannya oleh Menteri Brian Yuliarto, ini adalah pekerjaan berat kedepan. Mari meletakkan pendidikan sebagai modal utama memajukan negeri ini. Mengutip pendapat Nelson Mandela, pendidikan menjadi senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Dengan kata lain, pendidikan menjadi harapan setiap anak-anak Indonesia meraih tujuannya. Jangan karena akibat efisiensi, anak-anak negeri kemudian berjatuh satu per satu tidak melanjutkan pendidikan tingginya.

Kini kita semua bertumpu pada dan menaruh harapan kepada Menteri Brian Yuliarto untuk dapat merealisasikan hara-



Oleh:  
Moh Yamin  
Pemerhati Pendidikan

Mari meletakkan pendidikan sebagai modal utama memajukan negeri ini. Mengutip pendapat

nya memantapkan sumber daya manusia berkualitas dan melanjutkan keahliannya bagi semua. Kementerian Dikti Sainstek perlu dikelola dengan baik, memberikan arahan dan kebijakan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta dan tentunya perlu memberikan dukungan intervensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Banyak pekerjaan berat yang perlu dilaksanakan di Kementerian ini. Kini kita semua menunggu gebrakan menteri baru terkait agenda apa saja yang akan dilakukan dalam rangka mengawal kerja-kerja di Kementerian Dikti Sains dan Teknologi.

### Arah Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Yang memang sudah kita ketahui arah pendidikan tinggi kedepan adalah Brian Yuliarto. Seorang akademisi, seorang figur yang sudah dikenal luas yang mempunyai kapabilitas dirinya tidak hanya mengasah keterbacaan tetapi juga organisasi yang besar, menunjukkan pengalaman strategis organisasi dengan jenjang tinggi. Fakta ini tidak mengesalkan apabila akan menggantikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pun sudah terdapat kepastian. Arah pendidikan tinggi perlu dipertegas sebagai bagian yang terintegrasi untuk memantapkan wajah wajah pendidikan tinggi di republik ini. Kurikulum menjadi jantung untuk me-

laksanakan kerja-kerja mencetak sumber manusia unggul. Kehadiran kurikulum memberikan sumbangsih besar kemana setiap mahasiswa di setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta akan diarahkan. Membangun manusia Indonesia melalui perguruan tinggi membutuhkan kehadiran pendidikan tinggi yang tidak bisa diabaikan eksistensinya. Mendekatkan mahasiswa kepada fakta dan realitas sebagai sumber belajar untuk semakin matang dan dewasa menjelang kehidupan adalah sebuah hal niscaya. Memberikan ruang belajar (safety) kepada mahasiswa perlu dikordinasikan dengan baik. Kita mengidentifikasi ada limpatan besar yang dilakukan seorang Brian Yuliarto ketika menahkodai Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi. Poin empat dari Asta Cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden ada-

lalu mendukung peraturan tersebut untuk diimplementasikan, semua pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, civitas akademika kampus pun menunggu kepastian kebijakan tersebut. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak terkait bagaimana setiap anak Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi belajar dan mengembangkan kapasitas dirinya. Setali tiga uang, di tengah kebijakan negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran, apakah ini berdampak kepada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Semoga tidak. Namun terlepas apapun jawabannya, akses pendidikan yang dapat dinikmati semua anak Indonesia memerlukan bukti nyata. Dengan cara apapun yang mungkin dicari terobosan kebijakannya oleh Menteri Brian Yuliarto, ini adalah pekerjaan berat kedepan. Mari meletakkan pendidikan sebagai modal utama memajukan negeri ini. Mengutip pendapat Nelson Mandela, pendidikan menjadi senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Dengan kata lain, pendidikan menjadi harapan setiap anak-anak Indonesia meraih tujuannya. Jangan karena akibat efisiensi, anak-anak negeri kemudian berjatuh satu per satu tidak melanjutkan pendidikan tingginya.

pendidikan menjadi senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Dengan kata lain, pendidikan menjadi harapan setiap anak-anak Indonesia meraih tujuannya. Jangan karena akibat efisiensi, anak-anak negeri kemudian berjatuh satu per satu tidak melanjutkan pendidikan tingginya.

Bagi pemerintah pengisian dan upaya mendorong Kementerian Pendidikan tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memantapkan pendidikan tinggi sebagai modal utama memajukan negeri ini. Semoga semua energi kita untuk Indonesia menjadi kepastian. (\*)

Tulisan opini ini adalah tulisan pribadi penulis. Tidak mewakili Universitas Lambung Mangkurat. Penulis: Moh Yamin, pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, civitas akademika kampus. Email: mohyamin@unlam.ac.id